



**PERUBAHAN EKONOMI KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI
DI KECAMATAN ASEMBAGUS KABUPATEN SITUBONDO:
STUDI BIAYA TRANSAKSI, MODAL SOSIAL DAN
DINAMIKA PENDAPATAN**

TESIS

Oleh:
RENDI YANUAR WAHYUDI
NIM 1308 2020 1031

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2015**



**PERUBAHAN EKONOMI KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI
DI KECAMATAN ASEMBAGUS KABUPATEN SITUBONDO:
STUDI BIAYA TRANSAKSI, MODAL SOSIAL DAN
DINAMIKA PENDAPATAN**

**INSTITUTIONAL ECONOMY CHANGING OF IRRIGATION
MANAGEMENT IN ASEMBAGUS, SITUBONDO: A STUDY OF
TRANSACTION COST, SOCIAL CAPITAL
AND REVENUE DYNAMIC**

TESIS

**Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Magister Ilmu Ekonomi (S2)
dan mencapai gelar Magister**

**Oleh:
RENDI YANUAR WAHYUDI
NIM 1308 2020 1031**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2015**

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Puji Syukur kehadiran Allah Subhanahuwata'ala, Tuhan semesta alam, Maha Pengasih dan Penyayang dengan Segala Keagungan dan Kuasa-Nya, sholawat dan salam senantiasa kami haturkan kepada Baginda Rosulullah Sallallahu'alihiwasallam, manusia paling mulia di alam ini, yang karena nur nya Allah menciptakan alam semesta ini. Alhamdulillah, tesis ini dapat diselesaikan dengan baik dan selanjutnya akan saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku
2. Istri dan anak-anakku, Kafka dan Fattah
3. Almamaterku, Undip dan Unej
4. Guru-guruku sejak TK hingga paskasarjana

MOTTO

“Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang gemar berbuat kebaikan”
(QS. Al-Baqarah (2): 195)

“Aku diuji dengan empat hal yang kesemuanya membebaniku begitu berat dan
mencelakakan aku.
Yaitu iblis, dunia, jiwa dan hawa nafsuku. Bagaimana bisa keluar daripadanya,
akrena semuanya adalah musuhku.
Aku melihat hawa nafsu selalu mengajak dan membisikkan kecenderungannya di
dalam kegelapan syahwat dan pendapat.”
(Syair Abu Hazan Ar Razi)

“Jika engkau tidak mampu bersaing dengan para shalih dalam amalnya, maka
bersainglah dengan para pendosa dalam istiqhfarnya.”
(Ibnu Rajab)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rendi Yanuar Wahyudi

NIM : 130820201031

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul **“Perubahan Ekonomi Kelembagaan Pengelolaan Irigasi di Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo: Studi Biaya Transaksi, Modal Sosial dan Dinamika Pendapatan”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Desember 2015

Yang menyatakan,

Rendi Yanuar Wahyudi
NIM. 130820201031

TESIS

**PERUBAHAN EKONOMI KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI
DI KECAMATAN ASEMBAGUS KABUPATEN SITUBONDO:
STUDI BIAYA TRANSAKSI, MODAL SOSIAL DAN
DINAMIKA PENDAPATAN**

**INSTITUTIONAL ECONOMY CHANGING OF IRRIGATION
MANAGEMENT IN ASEMBAGUS, SITUBONDO: A STUDY OF
TRANSACTION COST, SOCIAL CAPITAL
AND REVENUE DYNAMIC**

Oleh:

**RENDI YANUAR WAHYUDI
NIM. 130820201031**

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Sebastiana Viphindartin, M.Kes
Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Siswoyo Hari Santosa, SE, M.Si

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Tesis : Perubahan Ekonomi Kelembagaan Pengelolaan
Irigasi di Kecamatan Asembagus Kabupaten
Situbondo: Studi Biaya Transaksi, Modal Sosial
dan Dinamika Pendapatan
Nama : Rendi Yanuar Wahyudi
NIM : 130820201031
Program Studi : Magister Ilmu Ekonomi
Konsentrasi : Perencanaan Pembangunan Wilayah
Disetujui untuk diuji : 22 Desember 2015

Oleh:

Pembimbing Utama

Dr. Sebastiana Viphindartin, M.Kes
NIP. 19641108 198902 2 001

Pembimbing Anggota

Dr. Siswoyo Hari Santosa, SE, M.Si
NIP. 19680715 199303 1 001

Mengetahui/Menyetujui
Pascasarjana Universitas Jember
Program Magister Ilmu Ekonomi
Ketua Program Studi

Dr. Siti Komariyah, SE, M.Si
NIP. 1971061020011122002

PENGESAHAN

JUDUL TESIS

**PERUBAHAN EKONOMI KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI
DI KECAMATAN ASEMBAGUS KABUPATEN SITUBONDO:
STUDI BIAYA TRANSAKSI, MODAL SOSIAL DAN
DINAMIKA PENDAPATAN**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Rendi Yanuar Wahyudi

NIM : 130820201031

Program Studi : Magister Ilmu Ekonomi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:
22 Desember 2015

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan
guna memperoleh gelar Magister Ilmu Ekonomi Program Pasca Sarjana
Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

1. Ketua : Prof. Dr. Sarwedi, MM
NIP. 19531015 198303 1 001
2. Sekretaris : Dr. Regina Niken Wilantari, SE, M.Si
NIP. 19740913 200112 2 001
3. Anggota I : Dr. I Wayan Subagiarta, M.Si
NIP. 19600412 198702 1 001
4. Anggota II : Dr. Sebastiana Viphindartin, M.Kes
NIP. 19641108 198902 2 001
5. Anggota III : Dr. Siswoyo Hari Santosa, SE, M.Si
NIP. 19680715 199303 1 001

Mengetahui/Menyetujui,
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi
Dekan,

Dr. Moehammad Fathorrazi, M.Si
NIP. 19630614 199002 1 001

Perubahan Ekonomi Kelembagaan Pengelolaan Irigasi di Kecamatan
Asembagus Kabupaten Situbondo: Studi Biaya Transaksi,
Modal Sosial dan Dinamika Pendapatan,

Rendi Yanuar Wahyudi

Magister Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember

ABSTRAK

Ketersediaan air irigasi yang mencukupi kebutuhan tanaman merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk mendukung produktivitas pertanian. Kelangkaan air menimbulkan konflik tersendiri diantara petani pemakai air. Untuk mengatasi konflik pemakaian air irigasi, Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk melakukan pengaturan terhadap pengelolaan air irigasi tersebut. Kebijakan pemerintah terkait pengelolaan irigasi telah mendorong terbentuknya himpunan petani pemakai air (HIPPA) yang diharapkan mampu meningkatkan partisipasi petani terhadap pelaksanaan operasional dan pemeliharaan saluran irigasi. Selain itu, investasi yang tinggi dalam pembangunan dan pemeliharaan saluran membutuhkan partisipasi dan kesadaran dari petani untuk ikut memeliharanya. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa perubahan kelembagaan pengelolaan irigasi di Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo melalui pendekatan biaya transaksi dan modal sosial, serta menganalisa dampak perubahan kelembagaan pengelolaan irigasi terhadap dinamika pendapatan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perubahan kelembagaan dalam pengelolaan irigasi yang terjadi tidak secara alamiah namun dipaksakan dengan adanya kebijakan pemerintah melalui Inpres No.3 Tahun 1999 terkait pengelolaan irigasi. Perubahan tersebut dapat terjadi terus menerus dan bersifat tidak tetap. Perubahan tersebut bersifat *non permanent* dan *continuous*. Dampak perubahan kelembagaan dapat terlihat dari adanya dinamika pendapatan yang diterima oleh petani akibat adanya pengelolaan irigasi yang dipengaruhi oleh biaya transaksi dan modal sosial. Pendapatan petani dipengaruhi oleh hasil produksi panen (jumlah) serta nilai produksi panen (harga). Jumlah produksi panen sangat berkaitan dengan produktivitas pertanian, dimana ketersediaan air menjadi salah satu unsur pendukung produktivitas pertanian.

Kata Kunci: perubahan ekonomi kelembagaan, pengelolaan irigasi, biaya transaksi, modal sosial, dan dinamika pendapatan

Institutional Economy Changing of Irrigation Management in Asembagus, Situbondo: a Study of Transaction Cost, Social Capital, and Revenue Dynamic.

Rendi Yanuar Wahyudi

Master of Economics, Faculty of Economics, University of Jember

ABSTRACT

Irrigation water availability covering plants needs is one of eventful factors to stand up for agricultural productivity. Water scarcity emerges a conflict between farmers and water users. To unravel the use of irrigation water conflict, government expelled policies to manage the use of that irrigation water. Government policies related to irrigation management have couraged locals to make farmer-water user association (HIPPA) which is expected to escalate farmers participation toward technical application and irrigation canal maintenance. Besides, high investment in canal development and maintenance requires participation and awareness from farmers to maintain. The objectives of this research is to analyse institutional irrigation management changing in Asembagus, Situbondo through transaction cost and social capital method, as well as to analyse the impact of institutional irrigation management changing toward revenue dynamic. The research results expose that there is improperly institutional changing in irrigation management occured but insisted to be applied by government policy through Inpres No.3 year 1999 in conjunction with irrigation management. The change can inconsistently happen. It is non permanent and continuous change. The impact of institutional changing can be noticed from revenue dynamic received by farmers on account of irrigation management influenced by transaction cost and social capital. Farmers' income is affected by the quantity of crop production and the price of harvest production. The quantity of harvest production is closely related to agricultural productivity in which the water availability becomes one of supporting elements in agricultural productivity.

Key words: Institutional economy changing, irrigation management, transaction cost, social capital, and revenue dynamic

RINGKASAN

Perubahan Ekonomi Kelembagaan Pengelolaan Irigasi di Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo: Studi Biaya Transaksi, Modal Sosial dan Dinamika Pendapatan, Rendi Yanuar Wahyudi, 130820201031;2015: 93 halaman, Program Studi Magister Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember.

Keberhasilan program ketahanan pangan sangat ditentukan oleh keberhasilan sektor pertanian. Dalam hal ini, salah satu faktor teknis yang sangat *essential* dalam mendukung produktivitas pertanian adalah ketersediaan air irigasi yang baik dan sesuai kebutuhan tanaman. Ketersediaan air yang langka (*water scarcity*) menjadi salah satu persoalan utama yang dihadapi oleh petani tanaman pangan. Kelangkaan air sering menyebabkan persaingan antar petani untuk mencukupi kebutuhan air bagi tanaman pangannya. Hal ini sering menimbulkan konflik diantara para pemakai air. Terutama apabila kondisi air berkurang seperti pada musim kemarau, konflik perebutan pemakaian air tak bisa dihindari. Hal ini membutuhkan pengaturan pemakaian air dan pengelolaan irigasi. Untuk mengatasi masalah tersebut kebijakan pengelolaan irigasi menjadi sangat penting.

Pembentukan sebuah lembaga Perhimpunan Petani Pemakai Air (P3A) terjadi setelah dikeluarkannya kebijakan Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 1982 tentang pengelolaan irigasi tersier yang dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan petani pemakai air. Selanjutnya, perubahan mendasar dalam pengelolaan air yang dilakukan oleh P3A menjadi semakin besar peran dan kewenangannya dengan adanya kebijakan pemerintah melalui Instruksi Presiden No.3 Tahun 1999. Inpres tersebut menyerahkan kewenangan yang lebih besar kepada P3A untuk dapat mengelola irigasi pada saluran tersier. Tidak hanya itu, melalui kebijakan tersebut pemberdayaan P3A diupayakan melalui semakin meningkatnya partisipasi petani dalam pelaksanaan operasional dan pemeliharaan saluran irigasi. Beberapa kebijakan lain seperti Undang-undang No.7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air dan Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 2006 tentang irigasi antara lain diarahkan untuk memperbaiki kinerja pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi.

Tujuan penelitian ini adalah 1) menganalisa perubahan kelembagaan pengelolaan irigasi di Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo melalui studi biaya transaksi dan modal sosial 2) menganalisa dampak perubahan kelembagaan pengelolaan irigasi terhadap dinamika pendapatan petani.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif pada sebuah obyek yaitu pengelolaan irigasi di saluran tersier dan menggambarkan kondisi yang sebenarnya terjadi dalam pengelolaan irigasi tersebut. Pengambilan data primer dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* pada informan yang terdiri dari para petani, perwakilan HIPPA, subblok dan juru pengairan. Pengambilan data dengan menggunakan teknik wawancara mendalam (*indept interview*) dan pengamatan langsung dilapangan (*Participant Observation*). Metode pengambilan data secara kualitatif pada informan dilakukan dengan metode *snowballing sampling* dimana proses penentuan informannya dilakukan dengan menetapkan informan kunci terlebih dahulu, selanjutnya akan dilakukan penelusuran terhadap informan tambahan sesuai informasi yang diberikan dari informan kunci. Pencarian informasi baru berhenti setelah didapat informasi yang jenuh.

Data-data yang dikumpulkan terkait biaya transaksi dalam pengelolaan irigasi, modal sosial, serta dinamika pendapatan petani yang terjadi dengan adanya kebijakan Ipres No.3 Tahun 1999. Data sekunder diperoleh dari Dinas Bina Marga dan Pengairan dan informasi lainnya yang mendukung kelengkapan data penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan terdapat Proses perubahan kelembagaan dalam pengelolaan irigasi merupakan perubahan yang terjadi tidak secara alamiah namun dipaksakan dengan adanya kebijakan pemerintah melalui Inpres No.3 Tahun 1999 terkait pengelolaan irigasi. Perubahan tersebut dapat terjadi terus menerus dan bersifat tidak tetap. Perubahan kelembagaan pada pengelolaan air dapat diuraikan sebagai berikut: *pertama* terjadinya perubahan kelembagaan pengelolaan irigasi terkait biaya transaksi bersifat *non permanen* dan *continuos*. Perubahan kelembagaan masih dapat terus terjadi seiring. Faktor pemicu terjadinya perubahan dapat berasal dari kebijakan yang dikeluarkan oleh

pemerintah untuk mengatur irigasi, namun dapat pula sebagai bentuk penyesuaian yang berorientasi pada kebutuhan dilapangan terkait pengelolaan air irigasi. Namun demikian, perubahan ini tidak selalu menghasilkan kelembagaan yang efisien. Hal ini terlihat dilapangan dengan munculnya *moral hazard* dari salah satu pelaku ekonomi yang memunculkan biaya transaksi pada pengelolaan dana IPAIR sesudah Inpres No.3 tahun 1999. *Kedua* perubahan kelembagaan pengelolaan irigasi terkait modal sosial bersifat *non permanen* dan *continuos*. Perubahan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh adanya kebijakan dalam pengelolaan irigasi namun juga interaksi antara petani dan lembaga pengelola irigasi yaitu HIPPA dan subblok. Dalam hal ini, kedekatan dan kekerabatan sebagai modal sosial berimplikasi negatif terhadap transaksi ekonomi yang terjadi dalam pengelolaan irigasi. Ikatan sosial yang kuat antara subblok dengan petani yang masih berkerabat mencegah petani lain diluar ikatan tersebut untuk mendapatkan pelayanan air yang sama. Namun disisi lain, adanya modal sosial juga menjembatani proses peredaman konflik akibat adanya perebutan air diantara petani.

SUMMARY

Institutional economy changing of irrigation management in Asembagus, Situbondo: a study of transaction cost, social capital, and revenue dynamic, Rendi Yanuar Wahyudi, 130820201031; 2015: 93 pages, Master of Economics Program, Faculty of Economics, University of Jember.

The success of food sustainability program is determined by agricultural sector success. In this case, one of immensely essential technique factors in standing up for agricultural productivity is good irrigation water availability and sufficient water needs for plants. Water scarcity availability becomes one of main problems faced by ricefield farmers. Water scarcity causes rivalry among farmers to have sufficient water needs for their plants. Moreover in dry season where the amount of water is abating, battle conflict to use water cannot be hindered. This requires water using regulation and irrigation management. To overcome the problem, irrigation management policy waxes so eventful.

Forming a farmer-water user association (P3A) institution takes place after goverment policy expelled through Government Regulation No.23 Year 1982 about tertiary irrigation management conducted by goverment along with farmers-water users. Furthermore, basic changing in water management conducted by P3A the role and authority begin to be colossal with goverment policy applied through President Instruction No.3 Year 1999. The policy devolves bigger authority to P3A to be able to manage irrigation on tertiary canal. Not only through that policy but also empowerment of P3A is encouraged to increase farmers' participation on the field and irrigation maintainance. Several other policies such as Regulations No.7 Year 2004 about water resources and Government Regulation No.20 Year 2006 about irrigation to be led to improve development progress and irrigation canal management.

The objectives of this study is 1) to analyse institutional changing of irrigation management in Asembagus, Situbondo through transaction cost and social capital, 2) to analyse the impact of institutional changing of irrigation management toward revenue dynamic of farmer.

This research is applied qualitative method on an object which is irrigation management in tertiary canal and the real condition occurred in managing the irrigation. Primary data collection is conducted by using purposive sampling technique on informants consisting farmers and HIPPA representatives, sub block, and irrigation keeper. Data collection applies indept interview technique and participant observation. Qualitative data collection method on informants conducted by snowballing sampling method in which the proses of determining informant is by deciding key informant at first, then the researcher will trace additional informants based on key informant information. Searching for current information stops after getting saturated information.

Data are collected related to transaction cost in irrigation management, social capital, as well as farmers revenue dynamic happened by applying President Instruction (Inpres) No.3 Year 1999 policy. Secondary data is obtained from Department of Highways and Irrigation and another supporting information for research data.

Reasearch results indicate that the process of intititional changing of irrigation management is the change unnaturally taken place but compelled by President Instruction (Inpres) No.3 Year 1999 policy related to irrigation management. The change can inconsistently happen. Institutional changing on water management can be elucidated as follows: first, institutional changing of irrigation management related to transaction cost is non permanent and continuous. Institutional changing can still take place. The trigger factor toward change can come from expelled policy by goverment to organize irrigation, but it also can be as a adjustment form orienting on field needs in conjunction with irrigation management. Nevertheless, this changing does not always result efficient institution. It can be noted by the emerging of moral hazard from one of economy doers who cost transaction on IPAIR financial management after Inpres No.3 year 1999. Second, institutional changing of irrigation management linked to social capital is non permanent and continuous. The change is not influenced by only the policy of irrigation management but also interaction between farmer and irrigation management institution that is HIPPA and sub block. In this case,

proximity and familiarity as social capital negatively affect economy transaction occurred in irrigation management. Strong social bond between sub block and farmer who is still relatively family prevents others outside the circle bond to get the same service as inside. In another side, The availability of social capital bridges the process of conflict mitigation due to water scramble among farmers.



PRAKATA

Segala puji bagi Allah Subhanahu wata'ala yang telah melimpahkan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis yang berjudul “Perubahan Ekonomi Kelembagaan Pengelolaan Irigasi di Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo: Studi Biaya Transaksi, Modal Sosial dan Dinamika Pendapatan”. Tesis ini disusun guna memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Magister pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Saya menyadari tesis ini merupakan karya kecil yang Saya harapkan dapat memberikan kontribusi bagi semua pihak yang membutuhkannya. Dalam pelaksanaan penelitian hingga proses penulisan tesis ini, penulis telah mendapat banyak sekali bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Sebastiana Viphindartin, M.Kes selaku Dosen Pembimbing Utama (DPU) yang telah meluangkan waktu membimbing dan memberikan arahan dengan penuh kesabaran dan ketulusan, serta atas semua motivasi dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis hingga penulis mampu menyelesaikan penulisan tesis ini.
2. Dr. Siswoyo Hari Santosa, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing Anggota (DPA), atas motivasi, kesabaran dan ketulusan dalam mencurahkan waktu, perhatian dan pikiran kepada penulis.
3. Dr. Siti Komariyah, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi yang telah memberikan motivasi dan arahan agar penulis mampu menyelesaikan studi di Program Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Jember.
4. Prof. Dr Sarwedi M.M selaku Ketua tim penguji, Dr. Rgina Niken Wilantari SE, M.Si, dan Dr. I Wayan Subagiarta, selaku Dosen Penguji atas saran dan masukannya kepada penulis untuk perbaikan tesis ini sehingga tesis ini dapat dikemas dengan baik.

5. Dekan Fakultas Ekonomi, Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Pembangunan serta seluruh Dosen Pengajar Program Magister Ilmu Ekonomi Universitas Jember atas bekal ilmu dan kelancaran studi yang diberikan kepada penulis.
6. Orang tuaku tercinta, Mama “Hj. Endang Kusmintasih” serta Papa “Alm. Wahyu Utomo” dan saudara-saudaraku, serta keluarga besar di Situbondo yang selalu memberi motivasi dan ketulusan doa bagi penulis untuk dapat menyelesaikan studi dengan baik.
7. Istriku, Kifayatul Khair, atas semua ketabahan, pengertian, cinta dan kasih sayangnya bagi penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik.
8. Anak-anakku tercinta, Kafka Wahyu Athala dan dan Fattah Wahyu Albarri yang Ayah sayangi
9. Rekan sejawat Magister Ilmu Ekonomi angkatan 2013, kelas Situbondo, atas segala kebersamaan dan kekeluargaan yang telah menjadi penyemangat bagi penulis untuk menyelesaikan studi. Proses perkuliahan yang akan jadi memory indah dalam hidup penulis.
10. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan dan penyelesaian tesis ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Semoga Allah Subhanahuwata’ala memberikan balasan terbaik-Nya atas semua ketulusan dan kebaikan yang diberikan kepada penulis. Semoga tesis ini bisa menjadi bagian dari ilmu pengetahuan dan dapat memberi manfaat bagi semua yang membacanya.

Situbondo, Desember 2015

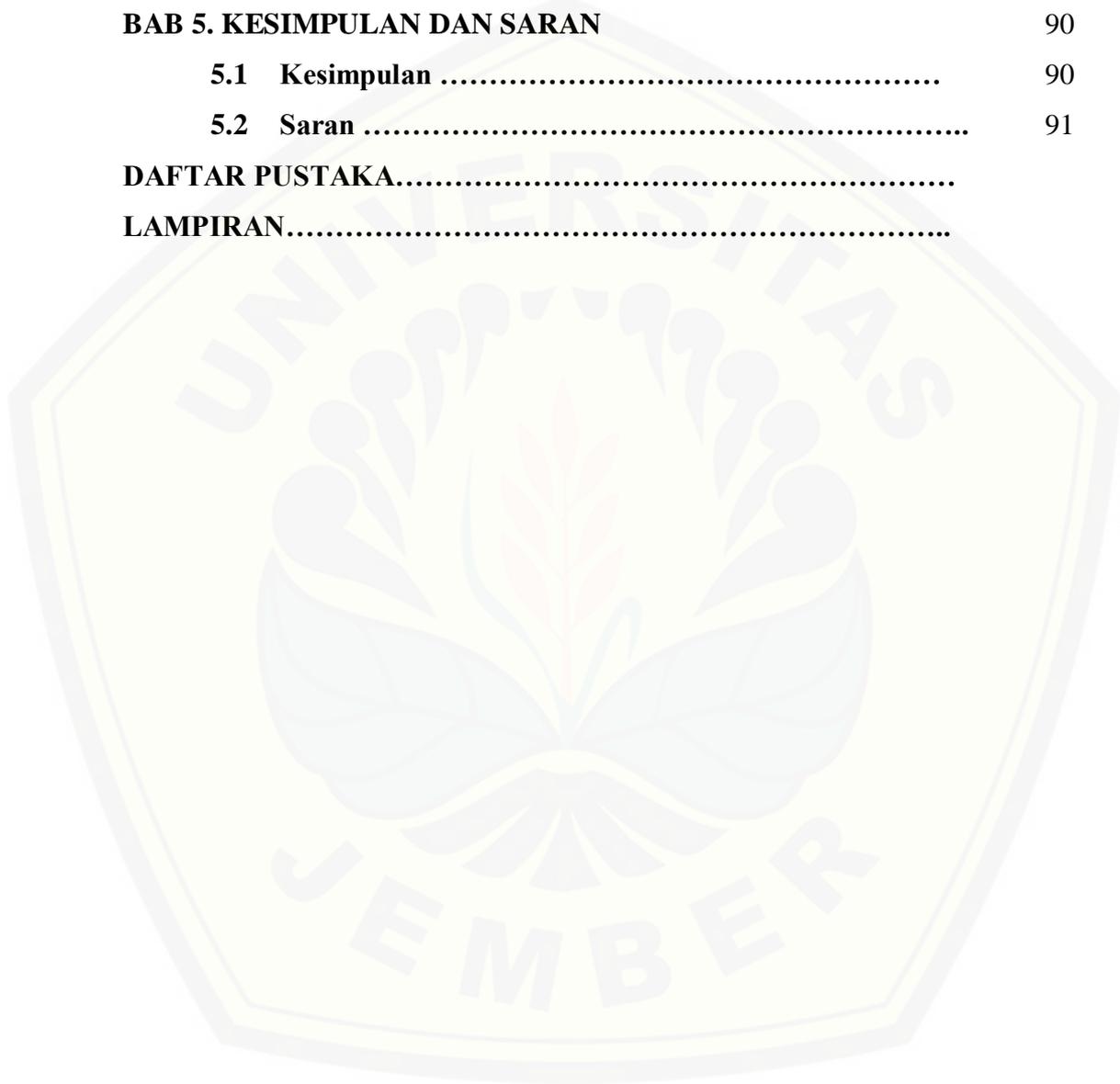
Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBINGAN	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
RINGKASAN	xi
SUMMARY	xiv
PRAKATA	xvii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Teori Ekonomi Kelembagaan	8
2.1.1.1 Perkembangan Teori Kelembagaan	9
2.1.1.2 Teori Perubahan Kelembagaan	9

2.1.2	Teori Biaya Transaksi	10
2.1.2.1	Definisi dan Makna Biaya Transaksi	10
2.1.2.2	Rasionalitas Terbatas dan Perilaku Oportunistik	11
2.1.3	Teori Modal Sosial	12
2.1.2.1	Definisi Modal Sosial	12
2.1.2.1	Implikasi Negatif dari Modal Sosial	13
2.2	Tinjauan Penelitian Sebelumnya.....	13
2.3	Kerangka Konseptual	21
BAB 3.	METODE PENELITIAN	25
3.1	Ruang Lingkup dan Lokasi Penelitian	25
3.2	Metode Penentuan Informan	25
3.3	Metode Pengambilan Data	26
3.4	Disain Penelitian	27
3.5	Metode Analisa Data	28
3.6	Definisi Penelitian	29
3.7	Batasan Penelitian	30
BAB 4.	HASIL DAN PEMBAHASAN	31
4.1	Gambaran Umum Kecamatan Asembagus	31
4.1.1	Deskripsi Kondisi Ekonomi Kecamatan Asembagus	31
4.1.2	HIPPA sebagai Lembaga Pengelola Irigasi	35
4.2	Perubahan Kelembagaan Dengan Adanya Inpres No. 3 Tahun 1999 Terkait Pengelolaan Irigasi	45
4.2.1	Perubahan Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Terkait Biaya Transaksi	47
4.2.1.1	Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Terkait Biaya Transaksi Sebelum Inpres No.3 Tahun 1999	54
4.2.1.2	Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Terkait Biaya Transaksi Sesudah Inpres No.3 Tahun 1999	57
4.2.2	Perubahan Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Terkait Modal Sosial	68
4.2.2.1	Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Terkait Modal Sosial Sebelum Inpres No.3 Tahun 1999	71

4.2.2.2 Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Terkait Modal Sosial Setelah Inpres No.3 Tahun 1999	75
4.3 Dampak Perubahan Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Terhadap Pendapatan Petani	83
4.4 Temuan Empiris dan Pembahasan	85
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	90
5.1 Kesimpulan	90
5.2 Saran	91
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN.....	



DAFTAR TABEL

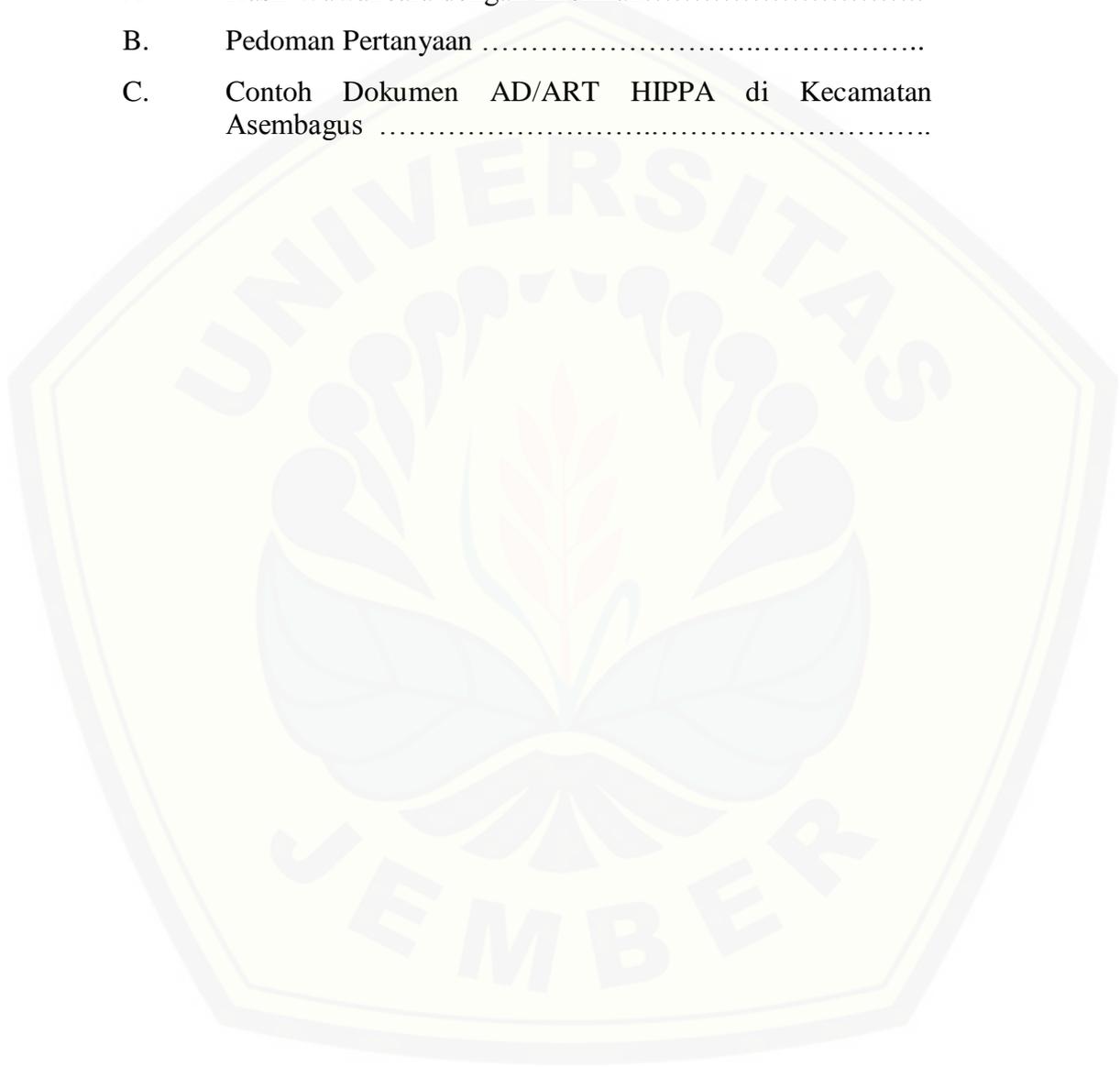
	Halaman
1.1 Jumlah HIPPA dan Baku Sawah (Ha)	4
2.1 Penelitian-penelitian Sebelumnya	16
4.1 Luas Tanah Sawah menurut Pengairannya (Ha) 2014	34
4.2 Daftar HIPPA di Kecamatan Asembagus (DAS Sampean Baru)	38
4.3 Jadwal Air Irigasi Kecamatan Asembagus (DAS Sampean Baru)	48
4.4 Perubahan Kelembagaan Terkait Biaya Transaksi Sebelum dan Sesudah Inpres No.3 Tahun 1999	53
4.5 Besar Iuran Pengelolaan Air (IPAIR) Berdasarkan Musim Tanam dan Letak Sawah Terhadap Saluran	60
4.6 Perubahan Kelembagaan Terkait Modal Sosial Sebelum dan Sesudah Inpres No.3 Tahun 1999	70
4.7 Harga Beberapa Komoditas Pertanian	85
4.8 Jumlah Produksi Beberapa Komoditas Per Musim Tanam ..	87
4.9 Biaya Produksi Pada Usaha Pertanian	88
4.10 Dinamika Pendapatan Petani	88

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1.1 Beberapa Kebijakan Pemerintah Terkait Pengelolaan Irigasi	3
1.2 Kerangka Konseptual	24
3.1 Disain Penelitian	27
4.1 Luas Wilayah Berdasarkan Desa di Kecamatan Asembagus	32
4.2 Penyerapan Tenaga Kerja di Kecamatan Asembagus Tahun 2013	33
4.3 Luas Area Tanaman Berdasarkan Komoditi Tahun 2014	34
4.4 Struktur Organisasi HIPPA Kecamatan Asembagus	39
4.5 Pintu Air Pada Saluran Tersier	41
4.6 Proses Terjadinya Perubahan Kelembagaan HIPPA	46
4.7 Pintu Air Pada Saluran Sekunder	52
4.8 Alur Pengelolaan Dana Iuran Pelayanan Air (IPAIR)	57
4.9 Alur Pemanfaatan Iuran Pengelolaan Air (IPAIR)	63
4.10 Unsur Pembangun Modal Sosial Pada Masa Lalu	74
4.11 Pintu Air Pada Saluran Primer	78
4.12 Potensi Konflik Pemanfaatan Air dan Cara Mengatasinya ...	79

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
A. Hasil Wawancara dengan Informan.....	
B. Pedoman Pertanyaan	
C. Contoh Dokumen AD/ART HIPPA di Kecamatan Asembagus	



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketahanan pangan merupakan salah satu program pemerintah sebagai wujud kelanjutan dari program swasembada beras pada periode pemerintahan sebelumnya. Keberhasilan program ketahanan pangan sangat ditentukan oleh keberhasilan sektor pertanian. Dalam hal ini, salah satu faktor teknis yang sangat *essential* dalam mendukung produktivitas pertanian adalah ketersediaan air irigasi yang baik dan sesuai kebutuhan tanaman. Air merupakan material yang penting dalam menjaga kelangsungan hidup seluruh makhluk hidup di bumi, sebagai sumber kehidupan baik bagi manusia, hewan termasuk dalam bidang pertanian. Hal tersebut menjadikan keberadaan air merupakan unsur yang sangat penting dan menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam pelaksanaan proses pertanian.

Ketersediaan air yang langka (*water scarcity*) menjadi salah satu persoalan utama yang dihadapi oleh petani tanaman pangan. Kelangkaan air sering menyebabkan persaingan antar petani untuk mencukupi kebutuhan air bagi tanaman pangannya. Selain itu, permintaan air untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, industri dan usaha lain juga semakin meningkat seiring meningkatnya pertumbuhan penduduk. Selama ini masyarakat petani sering menganggap air sebagai milik umum (*public goods*) sehingga pemakaiannya tidak memerlukan biaya ataupun aturan-aturan khusus. Hal ini sering menimbulkan konflik diantara para pemakai air. Terutama apabila kondisi air berkurang seperti pada musim kemarau, konflik perebutan pemakaian air tak bisa dihindari. Hal ini membutuhkan pengaturan pemakaian air dan pengelolaan irigasi. Untuk mengatasi masalah tersebut kebijakan pengelolaan irigasi menjadi sangat penting.

Pada awalnya, pengelolaan air desa dilakukan oleh petugas yang disebut *ulu-ulu* air yang dalam struktur organisasinya merupakan perangkat desa yang memiliki tugas untuk membantu Kepala Desa dalam mengatur air irigasi desa. Namun dalam perkembangannya, pemerintah melalui kebijakannya yaitu melalui Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 1982 tentang pengelolaan irigasi tersier yang

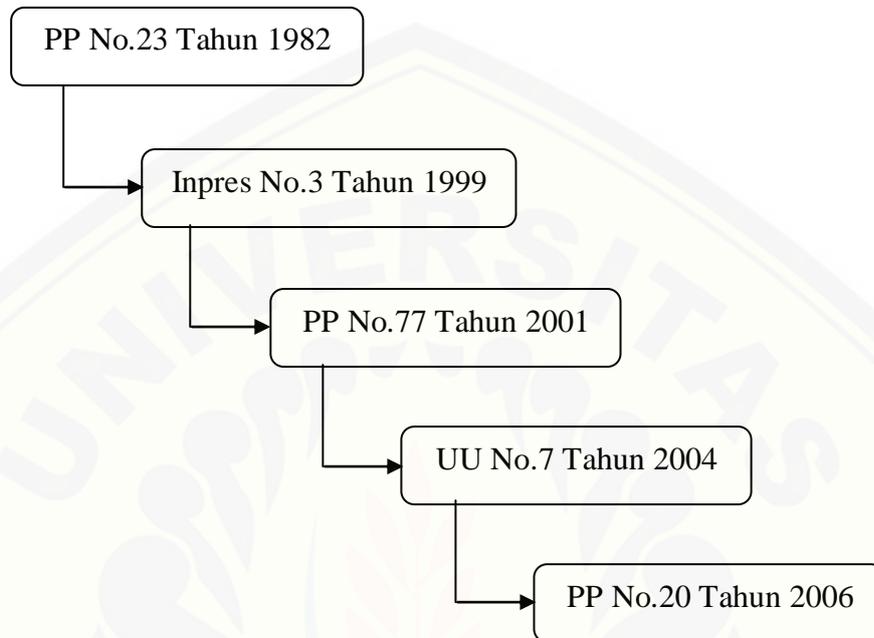
dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan petani pemakai air. Dalam hal ini, pemerintah menganjurkan pembentukan sebuah lembaga sebagai wadah bagi petani pemakai air dalam sebuah lembaga yang disebut Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).

Selanjutnya, perubahan mendasar dalam pengelolaan air yang dilakukan oleh P3A menjadi semakin besar peran dan kewenangannya dengan adanya kebijakan pemerintah melalui Instruksi Presiden No.3 Tahun 1999. Inpres tersebut menyerahkan kewenangan yang lebih besar kepada P3A untuk dapat mengelola irigasi pada saluran tersier. Tidak hanya itu, melalui kebijakan tersebut pemberdayaan P3A diupayakan melalui semakin meningkatnya partisipasi petani dalam pelaksanaan operasional dan pemeliharaan saluran irigasi.

Pemerintah melalui beberapa kebijakannya mencoba melakukan kembali pengaturan pengelolaan irigasi. Kebijakan pengelolaan irigasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No.7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air dan Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 2006 tentang irigasi antara lain diarahkan untuk memperbaiki kinerja pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi. Kebijakan pengelolaan irigasi mendorong pengelolaan sistem irigasi yang handal dan mandiri melalui pelaksanaan Pengembangan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP) yang dapat mendukung peningkatan produktivitas lahan dan produksi pertanian. PPSIP dikembangkan dengan meningkatkan partisipatif dari masyarakat pemakai air sendiri (Dirjen SDA). Dalam hal ini, para petani pemakai air membentuk perkumpulan petani pemakai air (P3A) atau himpunan petani pemakai air (HIPPA). P3A atau HIPPA merupakan kelembagaan lokal pengelola irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air secara demokratis dan berbadan hukum. HIPPA dibentuk pada setiap desa untuk menjalankan fungsi sebagai pengatur penggunaan air irigasi bagi kepentingan petani diwilayah desa tersebut.

Kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut bertujuan untuk mengatur pengelolaan air irigasi beserta pemeliharaan saluran untuk meredam konflik yang sering ditimbulkan akibat pemanfaatan air irigasi yang tidak adil dan merata. Selain itu, tingginya biaya investasi pembangunan saluran membutuhkan

partisipasi masyarakat untuk ikut terlibat dalam pelaksanaan pemeliharannya. Pada Gambar 1.1 akan disajikan Beberapa Kebijakan Pemerintah terkait pengelolaan Irigasi, yaitu:



Gambar 1.1 Beberapa Kebijakan Pemerintah Terkait Pengelolaan Irigasi

Rujukan data pada Gambar 1.1 memberikan gambaran bahwa pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya berupaya untuk melakukan perbaikan dalam pengelolaan air irigasi. Kebijakan tersebut untuk pengatur pemanfaatan air serta melakukan pemberdayaan terhadap P3A dalam melakukan operasional dan pemeliharaan irigasi yang mandiri dan partisipatif.

Kecamatan Asembagus merupakan salah satu kecamatan yang terletak di wilayah timur Kabupaten Situbondo yang memiliki luas wilayah 118,74 Km². Kecamatan Asembagus merupakan salah satu kecamatan yang dilalui oleh DAS Sampean Baru. DAS Sampean Baru merupakan jaringan irigasi yang memiliki luas areal sawah sebesar 5.942 Ha (DBMP, 2014). Kecamatan Asembagus terdapat 10 lembaga HIPPA dengan 2.597 anggota (Data BPS, 2014). Berikut akan disajikan Tabel 1.1 tentang Jumlah HIPPA pada tiap desa beserta luas areal baku sawah, yaitu:

Tabel 1.1 Jumlah HIPPA dan Baku Sawah (Ha)

No	Desa	Nama HIPPA	Baku Sawah (Ha)	DAS
1.	Mojosari	Sari Indah	426	Sampean Lama dan Sampean Baru
2.	Kertosari	Tani Makmur	228	Sampean Baru
3.	Perante	Karya Makmur	512	Sampean Lama dan Sampean Baru
4.	Kedung Loo	Makmur	292	Sampean Lama dan Sampean Baru
5.	Bantal	Bijaksana	282	Sampean Lama dan Sampean Baru
6.	Gudang	Setia Tani	95	Sampean Lama
7.	Trigonco	Karya Bakti	171	Sampean Lama
8.	Awar-awar	Mandiri	275	Sampean Lama
9.	Asembagus	Karya Usaha Tani	114	Sampean Lama
10.	Wringin Anom	Setiakawan	518	Sampean Lama

Sumber : Profil Pengairan 2014, diolah

Rujukan data pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa Kecamatan Asembagus dialiri oleh dua saluran irigasi yaitu DAS Sampean Lama dan DAS Sampean Baru. Terdapat empat HIPPA yang arealnya dialiri oleh kedua saluran irigasi tersebut, yaitu Desa Mojosari, Desa Kedung Loo, Desa Bantal dan Desa Perante. Dalam hal ini, HIPPA diharapkan mampu mengatur air irigasi sesuai kebutuhan petani. Perawatan saluran air juga menjadi tanggung jawab HIPPA.

Sumber pembiayaan HIPPA dalam mendanai pelaksanaan operasional dan pemeliharaan (O&P) adalah adanya iuran air yang dibayarkan oleh petani. Melalui Inpres No.3 Tahun 1999, pembiayaan pengelolaan irigasi menjadi tanggung jawab HIPPA yang pembiayaannya melalui pemungutan iuran pengelolaan air (IPAIR). Berdasarkan inpres tersebut, pengelolaan IPAIR sepenuhnya dikelola oleh HIPPA. Tujuan IPAIR adalah untuk mencapai pemulihan biaya secara penuh atas biaya operasional dan pemeliharaan (OP) dari sistem jaringan irigasi. Hal ini, menjadi tantangan dan peluang tersendiri bagi HIPPA dalam mengelola kegiatan usaha ekonominya demi tercapainya kesejahteraan para anggotanya. (Rachman dan Kariyasa, 2002). Dalam hal ini, HIPPA diharapkan menjadi lembaga sosial ekonomi yang mandiri dan mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Permasalahan pokok dalam pengelolaan dana IPAIR adalah terjadinya moral hazard dari pengurus HIPPA yang menyebabkan dana IPAIR tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Adanya moral hazard dari oknum pengurus HIPPA dan ketidak seimbangan informasi (*asymmetric information*) yang dimiliki antara HIPPA dan petani dapat menyebabkan munculnya biaya transaksi (*transaction cost*). Biaya transaksi ini didefinisikan sebagai biaya-biaya untuk melakukan proses negosiasi, pengukuran dan pemaksaan pertukaran (Yustika, 2012). Biaya transaksi ini cukup mahal karena banyaknya aktor yang terlibat di dalamnya serta kompleksitas pengaturan dan biaya pengawasan yang ditimbulkan (Fauzi, 2004). Selain itu, ketidak seimbangan antara hak dan pelayanan yang diberikan juga dapat menyebabkan petani tidak mau membayar IPAIR sesuai yang telah disepakati.

Sebagai lembaga sosial, HIPPA diharapkan mampu menerapkan aturan-aturan pengelolaan irigasi sesuai dengan norma-norma adat setempat yang dijunjung oleh petani. Dengan demikian, keberadaan HIPPA mampu menjadi jembatan tumbuhnya modal sosial diantara petani, sehingga petani saling memiliki kedekatan emosional yang baik. Menurut Pranadji, 2006, bahwa aspek modal sosial mutual *trust* merupakan komponen dasar dari pembentukan modal sosial yang lain seperti *cooperative* dan *network*. Ketiga komponen tersebut dalam perkembangannya tergantung pada kandungan elemen tata-nilai yang hidup dalam masyarakat. Kelembagaan lokal yang bersumber pada tata nilai yang hidup di masyarakat menjadi penting karena dianggap mampu membantu pencapaian pembangunan pertanian dan pedesaan (Fatah, 2006; Elizabeth, 2007; Sedana, 2012).

Dengan demikian menjadi sangat penting untuk mengkaji dinamika kelembagaan HIPPA terutama terkait aspek modal sosial dan biaya transaksi yang timbul sebagai langkah untuk mengetahui efektifitas dari lembaga HIPPA tersebut, serta dampak yang ditimbulkan oleh perubahan kelembagaan HIPPA terhadap dinamika pendapatan petani. Pendekatan keduanya dapat menjadi dasar dalam perumusan strategi dan kebijakan dalam pengembangan kelembagaan HIPPA yang mandiri dan sejahtera.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang muncul seperti :

1. Bagaimanakah perubahan kelembagaan pengelolaan irigasi di Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo melalui studi biaya transaksi dan modal sosial ?
2. Bagaimana dampak perubahan kelembagaan pengelolaan irigasi terhadap dinamika pendapatan petani?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Menganalisa perubahan kelembagaan pengelolaan irigasi di Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo melalui studi biaya transaksi dan modal sosial
2. Menganalisa dampak perubahan kelembagaan pengelolaan irigasi terhadap dinamika pendapatan petani

1.4 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain :

1. Kontribusi Teoritis:
Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang pola kelembagaan pengelolaan irigasi beserta perubahannya sejak dikeluarkannya kebijakan pemerintah tahun 1999 di Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo dan dampak perubahannya terhadap pendapatan petani
2. Kontribusi Praktis
 - 2.1 Bagi Pemerintah : hasil penelitian dapat menjadi referensi dan sumber informasi bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan untuk menentukan strategi pemberdayaan HIPPA yang mandiri dengan tidak meninggalkan nilai-nilai yang melekat dimasyarakat, untuk meningkatkan pendapatan petani.

- 2.2 Untuk menjadi rujukan dan masukan pemikiran baru bagi akademisi lainnya untuk dilakukan penelitian yang sebangun dengan fokus yang berbeda
- 2.3 Bagi HIPPA/P3A : hasil penelitian dapat memberikan gambaran dan informasi mengenai norma dan aturan main yang melekat dalam pengelolaan irigasi di Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo, sehingga dapat dilakukan upaya perbaikan agar HIPPA/P3A menjadi lebih baik lagi



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab 2 akan diuraikan mengenai landasan teori yang mendukung tema dan fokus penelitian. Landasan teori tersebut antara lain teori ekonomi kelembagaan, teori biaya transaksi dan teori modal sosial yang akan dipaparkan pada subbab 2.1. Beberapa penelitian terdahulu yang akan melengkapi referensi terkait tema dan fokus penelitian juga akan diuraikan pada subbab 2.2. Sedangkan kerangka konseptual yang menjadi acuan pemikiran dalam penelitian ini akan disajikan dalam subbab 2.3

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Ekonomi Kelembagaan

Teori ekonomi kelembagaan lahir dari sebuah proses dan bukan merupakan sebuah landasan yang telah direncanakan (Brousseau dan Glachant; 2007). Menurut Commons (1931) dalam Yustika (2012), kelembagaan diartikan sebagai kerangka hukum atau hak-hak alamiah (*natural rights*) yang mengatur tindakan individu, yang berhubungan dengan ‘perilaku ekonomi’ (*economic behavior*), menghadapi hal-hal yang dinamis dengan statis, proses dengan komoditas, kegiatan dengan perasaan, tindakan kolektif dengan tindakan individu, manajemen dengan keseimbangan dan pengawasan dengan kebebasan (*laissez faire*). Sedangkan menurut Bardhan (1989) dan Manig (1991), kelembagaan dimaknai sebagai aturan-aturan sosial, kesepakatan dan elemen lain dari struktur kerangka kerja interaksi sosial, kelembagaan juga mencerminkan sistem nilai dan norma dalam masyarakat.

Aturan main (kelembagaan) dalam kegiatan ekonomi akan menentukan seberapa efisien hasil ekonomi yang didapatkan serta menentukan seberapa besar distribusi ekonomi yang diperoleh oleh masing-masing partisipan. Dengan kata lain, apabila kelembagaan gagal dalam mendistribusikan kesejahteraan kepada partisipannya, maka akan terjadi perubahan kelembagaan (*Institutional change*) (Yustika; 2012). Perubahan kelembagaan tersebut terjadi akibat adanya perubahan kepentingan dari pelaku ekonomi untuk mencapai tujuan yang baru.

2.1.1.1 Perkembangan Ekonomi Kelembagaan

Pada dasarnya, teori ekonomi kelembagaan terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu ilmu ekonomi kelembagaan lama (*Old Institutional Economics*) dan ilmu kelembagaan baru (*New Institutional Economics*). Ekonomi kelembagaan lama (OIE) dipelopori oleh Thorstein Veblen dan John R. Commons. OIE lebih mengutamakan pada kajian mengenai kebiasaan (*habits*) yang dilakukan oleh pelaku ekonomi, sedangkan NIE lebih terfokus pada kendala yang dapat menghalangi proses perubahan kelembagaan dan pentingnya kelembagaan sebagai kerangka individu dalam berinteraksi (Hodgson, 1998:180-181; Williamson, 1998:75 dalam Yustika, 2012).

Dalam NIE penggunaan sumberdaya dimaksudkan untuk memenuhi pencapaian efisiensi. Seperti dalam teori ekonomi neoklasik, NIE menerima asumsi dasar tentang kelangkaan (*scarcity*) dan kompetisi (*competition*) dengan mengabaikan asumsi rasionalitas instrumental (*instrumental rationality*). Dalam pendekatan NIE, kegagalan pasar (*market failure*) disebabkan oleh informasi yang tidak sempurna (*imperfect information*), eksternalitas produksi dan barang-barang publik. NIE mengembangkan teori neoklasik dengan memasukkan peran biaya transaksi dan juga peran kelembagaan dalam rintangan untuk mencapai kinerja ekonomi (North, 1994; Williamson, 1985 dalam Vatn, 2006; Yustika, 2012).

2.1.1.2 Teori Perubahan Kelembagaan

Perubahan kelembagaan terjadi karena dua hal, yaitu: 1) Beberapa kelembagaan berkembang dan berubah secara spontan dengan adanya interaksi ekonomi, 2) Kelembagaan yang sengaja dirubah untuk mengatur kegiatan ekonomi. Perubahan kelembagaan secara spontan timbul sebagai respon dari munculnya permasalahan yang ada untuk dicarikan jalan keluarnya. Perubahan ini merupakan perubahan akibat perubahan kepentingan dari pelaku ekonomi (Vant, 2006; Yustika, 2012). Perubahan kelembagaan dapat disebabkan oleh perubahan aturan main (*rules of the game*) atau norma-norma yang dianut sebagai akibat dari kelangkaan dan perilaku individu yang tidak mudah ditebak (Yustika, 2012).

Perubahan kelembagaan merupakan sebuah proses yang terjadi secara terus menerus, sehingga perubahan kelembagaan disebut sebagai transformasi permanent (Manig, 1992: 5). Namun demikian, perubahan ini tidak selalu menghasilkan kelembagaan yang efisien. Perubahan sering mengalami hambatan baik secara formal atau informal (North, 1994; Hira & Hira, 2000). Perubahan kelembagaan merupakan sebuah proses akibat adanya interaksi antara pelaku ekonomi sebagai akibat adanya perubahan kepentingan dari pelaku ekonomi.

2.1.2 Teori Ekonomi Biaya Transaksi

Yeager (1999) yang menyebutkan bahwa teori ekonomi kelembagaan merupakan perluasan dari teori biaya transaksi (*transaction cost*) sebagai akibat terjadinya kegagalan pasar. Dimana pada teori ekonomi neoklasik yang menganggap bahwa pasar berjalan sempurna tanpa biaya apapun (*costless*). Hal ini terjadi karena ekonomi neoklasik berpendapat bahwa penjual dan pembeli sama-sama memiliki informasi yang sempurna (*symmetric information*) dan saling berkompetisi dalam menentukan harga. Dalam kenyataannya, proses jual-beli dalam pasar sangat tidak sempurna (*asymmetric information*). Informasi yang asimetris ini yang akhirnya menimbulkan biaya transaksi (Yustika; 2012). Hal ini dipertegas oleh North; 1990 yang menolak asumsi adanya informasi sempurna dan pertukaran tanpa biaya (*costless exchange*), sebaliknya terdapat biaya transaksi.

2.1.2.1 Definisi dan Makna Biaya Transaksi

Biaya transaksi adalah ongkos untuk melakukan negosiasi, mengukur dan memaksakan pertukaran (*exchange*). Biaya ini dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu 1) biaya pencarian dan informasi 2) biaya negosiasi (*bargaining*) dan keputusan atau mengeksekusi kontrak dan 3) biaya pengawasan (*monitoring*), pemaksaan dan pemenuhan/pelaksanaan (*compliance*). (Yustika; 2012 dan Mburu; 2002:4). North (1990) menyatakan bahwa biaya transaksi merupakan biaya mencari informasi yang meliputi biaya untuk pengukuran kelengkapan

(*attributes*), biaya untuk melindungi hak-hak kepemilikan (*property rights*), dan menegakkan kesepakatan (*enforcing agreements*).

Dalam Dietrich (1994) dan Hart (1995) membedakan biaya transaksi menjadi tiga jenis biaya, yaitu 1) biaya yang muncul atas seluruh perbedaan yang terjadi setelah kontrak diputus 2) biaya negosiasi dengan pihak lain atas rencana yang telah dibuat 3) biaya pembuatan rencana yang dalam implementasinya bisa ditegakkan oleh pihak ketiga seperti pengadilan atau hakim. Selain itu, biaya transaksi juga dapat dikelompokkan menjadi biaya transaksi sebelum kontrak (*ex-ante*) dan setelah kontrak (*ex-post*). Biaya transaksi *ex-ante* meliputi biaya membuat draft negosiasi dan mengamankan kesepakatan. Sedangkan biaya transaksi *ex-post* meliputi biaya kegagalan adaptasi (*mal adaption*), biaya tawar menawar (*haggling cost*) untuk mengoreksi penyimpangan setelah kontrak, biaya merancang dan menjalankan kegiatan yang berhubungan dengan tata kelola pemerintahan, biaya pengikatan untuk menjamin komitmen.

2.1.2.2 Rasionalitas Terbatas dan Perilaku Oportunistik

Rasionalitas terbatas (*bounded rationality*) dan perilaku oportunistik (*opportunistic*) merupakan dua asumsi yang harus ada ketika membicarakan analisa biaya transaksi. Kedua asumsi tersebut dimanifestasikan dalam wujud menghindari kerugian (*adverse selection*), penyimpangan moral (*moral hazard*), penipuan, melalaikan kewajiban dan bentuk-bentuk perilaku strategis lain (Williamson; 1981b dalam Yustika; 2012 dan Williamson;2005 dalam Rossiaud dan Locatelli; 2010).

Dietrich, 1994 memaparkan bahwa konsep *bounded rationality* berdasarkan dua prinsip yaitu 1) informasi yang tersedia sangat kompleks untuk dikelola (*informational complexity*) 2) informasi yang tidak lengkap (*incomplete information*) yang menyebabkan ketidakpastian informasi (*informational uncertainty*). Sedangkan perilaku oportunistik adalah upaya untuk mendapatkan keuntungan melalui praktik yang tidak jujur dalam kegiatan transaksi (Yustika; 2012).

2.1.3 Teori Modal Sosial

Modal sosial merupakan suatu disiplin ilmu yang dianggap mampu menggabungkan antara disiplin-disiplin ilmu yang lain. Berbeda dengan dua konsep yang sudah populer sebelumnya, yaitu modal ekonomi dan modal manusia, modal sosial bukanlah entitas tunggal (*single entity*). Modal sosial merupakan entitas majemuk yang mengandung dua elemen, yaitu 1) modal sosial mencakup struktur sosial, modal sosial dipengaruhi oleh struktur sosial 2) modal sosial memfasilitasi tindakan tertentu dari aktor ekonomi pada struktur ekonomi tersebut (Coleman, 1988 dan Yustika, 2012).

2.1.3.1 Definisi Modal Sosial

Pengertian modal sosial memiliki bentangan yang sangat luas. Beberapa ahli mendefinisikan modal sosial secara berbeda-beda dengan sudut pandangnya sendiri yang saling melengkapi. Diantaranya seperti yang digagas oleh Bourdieu yang menyatakan bahwa modal sosial sebagai agregat sumber daya actual ataupun potensial yang diikat dalam sebuah jaringan yang awet (*durable*) sehingga terdapat sebuah hubungan persahabatan (*acquaintance*) yang saling menguntungkan. Bourdieu lebih focus kepada kemampuan modal sosial untuk menghasilkan sumberdaya ekonomi. Sedangkan menurut Coleman (1988), modal sosial sebagai struktur hubungan sosial, khususnya peran modal sosial dalam mempengaruhi modal manusia. Dalam hal ini coleman (1988), lebih memfokuskan pada modal sosial yang baru bisa eksis apabila berinteraksi dengan struktur sosial. Coleman (1988) menyebut terdapat tiga bentuk modal sosial, yaitu 1) struktur kewajiban (*obligations*), ekspektasi (*expectation*), kepercayaan (*trustworthiness*). 2) jaringan informasi (*information channels*) 3) norma dan sanksi yang efektif (*norm and effective sanctions*) (Bourdieu, 1993; Coleman, 1988).

Dengan demikian, terlihat bahwa modal sosial selalu berkaitan dengan struktur sosial dimana masyarakat itu berdiam. Hubungan transaksi ekonomi yang selalu berulang dan menghasilkan pencapaian yang bagus, dalam jangka panjangnya akan menghasilkan ekspektasi yang baik daripada sekedar relasi

ekonomi. Modal sosial dalam bentuk ekspektasi dan kepercayaan inilah yang mampu mengakses keunggulan untuk mendapatkan benefit ekonomi (Yustika; 2012).

2.1.3.2 Implikasi negatif dari Modal Sosial

Selama ini konsep modal sosial dipandang terlalu positif yang beranggapan bahwa modal sosial sebagai variable yang dapat memberikan kebaikan bersama seperti dalam pembangunan ekonomi. Kenyataannya, modal sosial bisa saja memberikan implikasi negatif bagi kegiatan ekonomi. Beberapa implikasi negatif tersebut antara lain 1) Ikatan sosial yang cenderung kuat akan membatasi akses pihak luar memperoleh peluang yang sama dalam kegiatan ekonomi 2) Dapat saja terjadi dalam sebuah komunitas/kelompok akan mengorbankan inisiatif dari anggotanya karena dianggap akan mengganggu kepentingan (ekonomi) komunitas tersebut 3) Norma yang terlalu kuat akan membuat anggota komunitas saling mengawasi, sehingga tidak ada celah bagi anggotanya untuk berbuat ‘menyimpang’, mungkin dalam beberapa hal, tindakan ‘menyimpang’ ini berarti ada usaha kreatif untuk melakukan inovasi 4) untuk anggota kelompok yang lemah, norma yang terlalu kuat dapat berarti eksploitasi yang dapat membuat anggota yang lemah akan tersingkir dan melarikan diri dari komunitas tersebut (Yustika; 2012)

2.2 Tinjauan Hasil Penelitian Sebelumnya

Beberapa penelitian terdahulu terkait dengan dinamika kelembagaan HIPPA banyak dilakukan. Peran lembaga HIPPA dalam pengelolaan air belum dirasakan maksimal oleh petani secara menyeluruh. Hal ini disebabkan oleh kurangnya koordinasi HIPPA dengan lembaga lain seperti GHIPPA ataupun instansi terkait. Lemahnya koordinasi ditunjukkan dengan pengaturan penggunaan air yang tidak sesuai dengan harapan anggota dan masih lemahnya penegakan hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh anggota, seperti pembobolan saluran, perusakan saluran tersier ataupun pengaturan air dengan membuka pintu air secara bebas, dan pelanggaran AD/ART (seperti, keengganan membayar iuran) (Saadah, 2012;

Sitompul, 2012; Listyawati, 2011). Menurut Syamsir (2011), lingkungan eksternal organisasi HIPPA dapat mempengaruhi perubahan organisasi. Hal ini disebabkan lingkungan eksternal dapat mempengaruhi efektifitas dan struktur organisasi. Pengembangan organisasi harus terfokus pada pembentukan kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan lingkungannya.

Partisipasi petani dalam pengelolaan sumberdaya air perlu ditingkatkan, tidak hanya pada pengelolaan di tingkat usahatani, namun sampai kepada distribusi dan transportasi ditingkat atas. Pembentukan organisasi HIPPA Gabungan/Federasi berdasarkan hamparan hidrologis merupakan langkah strategis dalam upaya memberi kewenangan lebih luas dalam pengelolaan OP irigasi. Selain upaya penyesuaian kelembagaan di tingkat petani, keberhasilan pengelolaan irigasi juga bergantung kepada kinerja lembaga pengelola air ditingkat distribusi dan alokasi. Dengan demikian, kelembagaan yang perlu mendapat perhatian seksama adalah Panitia Irigasi Tk.I dan II, Panitia Tata Pengaturan Air (PTPA), dan unit Pengelola Sumber Air serta HIPPA.(Rachman dan Kariyasa, 2002; Rachman, 2009)

Penelitian yang dilakukan oleh Arif, dkk (2006) memaparkan bahwa pelaksanaan O&P dipengaruhi pasar, iklim, keragaman budaya dan dinamika masyarakat, adanya pemahaman bersama bahwa permasalahan yang timbul dapat diselesaikan dengan dialog dan perlu upaya terus menerus untuk meningkatkan komitmen bersama dalam pelaksanaan O&P. Salah satu kendala dalam pelaksanaan O&P adalah minimnya dana (Listyawati, 2011) Sehingga perlu diterapkan iuran irigasi yang formulasi besarnya berbasis pada nilai ekonomi air irigasi dan kuantitas air irigasi yang digunakan (Sumaryanto, 2006). Sedangkan Darma dan Fudjadja (2011) memaparkan bahwa penetapan iuran berdasarkan program kerja kelompok, pemberian insentif terhadap pengelolaan IPAIR dan pembayaran sistem tunai di rumah anggota HIPPA. Pengelolaan IPAIR sering menimbulkan konflik tersendiri. Untuk mengatasi konflik pemanfaatan air dalam pengelolaan irigasi perlu mempertimbangkan aspek-aspek antara lain : transparansi, akuntabilitas, hak atas air dan aturan representasi (Rachman, 2009).

Penelitian mengenai biaya transaksi pada DAS dilakukan oleh Ginoga, dkk, 2007 yang menyebutkan bahwa pengelolaan air dengan pembangunan hutan tanaman rakyat, melalui reforestasi atau aforestasi dalam bentuk agroforestry mampu menjangkau kantong-kantong konservasi dan bisa mengurangi biaya transaksi. Biaya transaksi merupakan salah satu instrument kearah efisiensi lembaga HIPPA. Biaya transaksi yang semakin tinggi, munculnya *free rider*, resiko dan ketidakpastian menunjukkan semakin sulitnya menerapkan institusi yang efektif (Rachman, 2009). Hal tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi HIPPA sebagai kelembagaan formal untuk menjadi institusi yang efektif dalam pengelolaan IPAIR guna mendukung pelaksanaan OP.

Untuk menghasilkan kinerja jaringan yang semakin baik, diperlukan adanya sinergi antara modal sosial, modal fisik, modal manusia dan modal alam dalam pengelolaan irigasi. Modal sosial dianggap penting karena memberi peran dalam keberhasilan pembangunan pertanian dan pedesaan. Modal sosial tersebut antara lain *trust*, *norms* dan *social network*. Modal sosial tersebut berakar dari tata nilai yang berlaku di masyarakat (Sedana, 2012; Pranadji, 2006). Modal sosial akan menjadi jembatan dalam pemecahan konflik yang sering terjadi diantara petani.

Tabel 2.1. Penelitian-penelitian sebelumnya

No	Peneliti	Judul	Uraian
1	Rachman dan Kariyasa, 2002	Dinamika Kelembagaan Pengelolaan Air Irigasi	Partisipasi petani dalam pengelolaan sumberdaya air perlu ditingkatkan, tidak hanya pada pengelolaan di tingkat usahatani, namun sampai kepada distribusi dan transportasi ditingkat atas. Pembentukan organisasi HIPPA Gabungan/Federasi berdasarkan hampanan hidrologis merupakan langkah strategis dalam upaya 16ember kewenangan lebih luas dalam pengelolaan OP irigasi. Selain upaya penyesuaian kelembagaan di tingkat petani, keberhasilan pengelolaan irigasi juga bergantung kepada kinerja lembaga pengelola air ditingkat distribusi dan alokasi. Dengan demikian, kelembagaan yang perlu mendapat perhatian seksama adalah Panitia Irigasi Tk.I dan II, Panitia Tata Pengaturan Air (PTPA), dan unit Pengelola Sumber Air serta HIPPA.
2	Arif, dkk, 2006	Pengembangan Konsep Sistem Operasi Dan Pemeliharaan (O & P) Daerah Irigasi Multiguna Dengan Membangun Komitmen Untuk Berbuat Konsensus Antar Pelaku : Sebuah Kasus Di Jawa Timur	Pelaksanaan O&P dipengaruhi pasar, iklim, keragaman budaya dan dinamika masyarakat, adanya pemahaman bersama bahwa permasalahan yang timbul dapat diselesaikan dengan dialog dan perlu upaya terus menerus untuk meningkatkan komitmen bersama dalam pelaksanaan O&P
3	Pranadji, 2006	Penguatan Modal Sosial Untuk Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan	Beberapa indikator modal sosial dalam perbaikan pengelolaan ALK secara berkelanjutan adalah kuat atau lemahnya solidaritas, manajemen sosial, keorganisasian

		Dalam Pengelolaan Agroekosistem Lahan Kering	jaringan kerja, struktur sosial dan kegotong royongan masyarakat setempat. Modal sosial relative tajam bisa diamati di tingkat masyarakat kecil atau dukuh. Jalinan <i>mutual trust</i> , <i>mutual respect</i> dan <i>mutual benefit</i> masih ditemukan pada masyarakat dukuh. Namun jalinan ini mulai memudar pada masyarakat tingkat desa. Dalam pengelolaan ALK berkelanjutan membutuhkan gabungan tata nilai untuk penguatan modal sosial dan penguatan modal materi secara sinergis. Tata nilai sebagai penguatan modal sosial antara lain rasa malu/harga diri, empati, kejujuran, amanah, altruism, bervisi kedepan dan rasionalis. Sedangkan untuk penguatan modal antara lain kerja keras dan rajin, hemat, gandrung inovasi, menghargai prestasi kerja, bervisi kedepan dan rasional.
4	Ginoga, dkk, 2007	Biaya Transaksi Dan Kelembagaan Pengelolaan DAS : Perspektif Untuk Sub DAS Cicitih	pengelolaan air dengan pembangunan hutan tanaman rakyat, melalui reforestasi atau aforestasi dalam bentuk agroforestry mampu menjangkau kantong-kantong konservasi dan bisa mengurangi biaya transaksi
5	Rachman, 2009	Kebijakan Sistem Pengelolaan Irigasi : Kasus Provinsi Banten	Pengembangan dan pemberdayaan asosiasi petani pemakai air dapat dilakukan dengan memberikan tanggung jawab yang lebih besar melalui pendekatan kolektif dalam bentuk federasi. Untuk mengatasi konflik pemanfaatan air dalam pengelolaan irigasi perlu mempertimbangkan aspek-aspek antara lain : transparansi, akuntabilitas, hak atas air dan aturan representasi.

6	Listyawati, 2011.	Konflik Pemanfaatan Sumberdaya Air Untuk Irigasi Di Kecamatan Minggir Kabupaten Sleman	Faktor-faktor penyebab konflik adalah : belum adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian izin hak guna usaha air, belum ada koordinasi yang baik antar instansi baik secara vertical maupun horizontal serta antara instansi dengan lembaga masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air, Petani dan Petambak belum memiliki <i>sense of belonging</i> terhadap saluran irigasi dan belum adanya kesadaran dalam pelaksanaan operasional dan pemeliharaan (OP) saluran, pendanaan OP yang kurang memadai dan SDM pada instansi yang berwenang kurang baik kualitas dan kuantitasnya
7	Syamsir., 2011.	Saling Hubungan Antara Lingkungan Eksternal dan Lingkungan Internal Himpunan petani pemakai air	Salah satu yang mempengaruhi perubahan organisasi adalah lingkungan eksternal organisasi, dan perubahan serta pengembangan organisasi harus terfokus pada pembentukan kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan lingkungannya
8	Darma, dan Letty Fudjaja, 2011.	Penguatan HIPPA Untuk Pengelolaan IPAIR Dan Pemeliharaan Saluran Irigasi Di Kabupaten Pinrang	Faktor yang mempengaruhi efektifitas pengelolaan air adalah kekuatan kelembagaan yang ditunjukkan dengan keaktifan pengurus, kemampuan pengurus mengelola IPAIR, keterbukaan pengurus, keberadaan program kerja, insentif pengurus dalam penagihan IPAIR, dan keaktifan anggota HIPPA. Pengelolaan IPAIR dan iuran HIPPA secara efektif dapat dilakukan dengan penetapan besarnya iuran HIPPA dan IPAIR berdasarkan program kerja kelompok, pemberian insentif terhadap pengelola IPAIR, pembayaran system tunai di rumah anggota HIPPA, dan meningkatkan komunikasi dan pengumuman kegiatan kelompok melalui mesjid,

			sanggar tani dan kantor desa.
9	Saadah dan Mahyuddin, 2012	Unsur-unsur Pembangunan Dalam Pengelolaan Pengairan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan sumberdaya pengairan tidak efisien karena terjadi pendangkalan pada saluran sekunder, pintu air diatur secara bebas oleh petani, beberapa saluran tersier rusak atau dimatikan oleh petani, banyak petani yang membuat saluran pintas, kurang tenaga pengatur pintu air, belum ada sanksi yang diberlakukan bagi petani yang membuat saluran pintas dan mematikan saluran tersier. 2. Mekanisme pengelolaan pengairan tidak berfungsi karena belum terjadi koordinasi antar HIPPA dan GHIPPA, pengaturan penggunaan air tidak sesuai harapan anggota, dan duplikasi pembinaan HIPPA antara Dinas Pengairan dan Dinas Pertanian 3. Penegakan hukum terhadap pelanggaran membuat <i>balombong</i>, mematikan saluran tersier belum ada, karena Perda tentang pengairan tidak mengatur sanksi-sanksi
10	Sitompul, dkk, 2012	Sikap Petani Terhadap Perkumpulan Pemakai Air (HIPPA)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan organisasi mengalami peningkatan dalam jumlah anggota sebanyak 6.4% pertahun, rapat anggota selalu terlaksana. Sedangkan jumlah iuran yang dibayarkan petani mengalami penurunan 2. Kegiatan yang dilaksanakan adalah mengatur pembagian dan penggunaan jaringan irigasi, melaksanakan pemungutan iuran, mengadakan rapat anggota dan membuat laporan pertanggungjawaban, gotong royong untuk pemeliharaan irigasi. Sedangkan yang tidak dilaksanakan adalah memberi sanksi tegas bagi

			<p>anggota yang melanggar AD/ART, mengajukan bantuan ke pemerintah, pengembangan SDM dan penyuluhan kepada petani anggota</p> <ol style="list-style-type: none">3. Sikap petani terhadap HIPPA adalah 43.33% bersikap positif dan 56.67% bersikap negative4. Karakteristik sosial ekonomi petani anggota yang memiliki hubungan dengan sikap petani terhadap HIPPA adalah pengalaman bertani5. Kendala yang dihadapi adalah kualitas air yang kurang baik, masalah pembukuan, kurangnya wawasan anggota dan pengurus tentang organisasi dan pengembangan usaha tani, serta tidak adanya kesepakatan antara petani hilir dan hulu dalam pembagian saluran air irigasi
--	--	--	--

Sumber : Data diolah dari berbagai sumber, 2015

2.3 Kerangka Konseptual

Organisasi Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) merupakan lembaga pengelola air berbadan hukum yang bertindak sebagai pengelola air dan jaringan irigasi di wilayah yang sudah ditentukan. HIPPA sebagai organisasi pengelola air tidak hanya berperan secara teknis saja tetapi juga merupakan lembaga sosial, yang penerapan aturannya sering menyesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Pasandaran dan Taryono (1993) bahwa pengaturan irigasi sebagai upaya generalisasi kebijaksanaan, sering mendapatkan hambatan apabila penerapannya tanpa memperhatikan norma-norma setempat.

Dalam konteks kelembagaan irigasi, terdapat tiga aspek yang sangat berperan :

1. Batas Yurisdiksi (*jurisdiction of boundary*) yaitu batas otoritas suatu lembaga dalam mengatur sumber daya air, yang umumnya berdasarkan batas hidrolis seperti saluran sekunder dan saluran primer.
2. Hak kepemilikan (*property rights*) yaitu hak setiap individu petani untuk mendapatkan pelayanan air sesuai dengan kewajiban yang dibebankan.
3. Aturan representasi (*rule of representation*) yaitu aturan yang telah disepakati dengan tujuan untuk menjamin terjadinya keseimbangan antara hak atas pelayanan air yang diperoleh dengan besarnya kewajiban yang dibebankan. Agar aturan ini bisa ditegakkan perlu adanya penerapan sanksi secara konsisten.

Ketiga aspek tersebut merupakan pedoman bagi HIPPA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dilapangan. Aspek-aspek tersebut saling melengkapi dan berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama.

Pada dimensi yang berbeda, terdapat aspek teknis yang berperan dalam pelaksanaan operasional dan pemeliharaan (OP) yaitu:

1. Alokasi air (*water allocation*). Pengalokasian air merupakan hal yang sangat sensitif dan mudah menimbulkan konflik. Pengalokasian air merupakan agenda penting pada HIPPA dimana pendistribusiannya sudah diatur berdasarkan kesepakatan bersama melalui rapat AD/ART.

- Operasional dan pemeliharaan (*operation and maintenance (O&P)*). Aspek O&P merupakan bagian dari tugas dan fungsi dari HIPPA. Biaya operasional dan pemeliharaan didapatkan dari hasil pemungutan iuran (IPAIR) yang dibebankan kepada petani pemakai air. Keberhasilan pelaksanaan OP merupakan indikator efektifitas lembaga HIPPA.

Keterpaduan kedua aspek tersebut dalam pengelolaan irigasi akan berpengaruh terhadap hasil, efisiensi dan optimasi pengalokasian sumberdaya air. Lemahnya keterpaduan aspek teknis dan kelembagaan akan menimbulkan konflik manajemen sumber daya air. Efisiensi yang dimaksud adalah untuk mengurangi biaya transaksi (*transaction cost*). Biaya transaksi timbul karena adanya informasi yang tidak simetris antara petani yang membutuhkan air dengan pengurus HIPPA yang mengetahui jumlah air tersedia. Biaya transaksi ini meliputi 1) pencarian informasi jumlah air 2) perawatan saluran irigasi dan 3) pengawasan air. Biaya-biaya tersebut menjadi kewajiban dari petani pemakai air sebagai bentuk kontribusi dalam biaya OP melalui iuran irigasi/iuran pengelolaan air (IPAIR). Besarnya IPAIR ditentukan oleh masing-masing HIPPA. Berdasar Inpres No.3/1999, dana IPAIR dikelola sepenuhnya oleh HIPPA untuk dana OP dan membiayai kelangsungan lembaga tersebut. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat hambatan dan kendala dalam penarikan iuran IPAIR. Hal ini disebabkan masih adanya anggapan bahwa air merupakan anugerah Tuhan (Public Goods) sehingga tidak perlu membayar iuran. Tidak optimalnya pelayanan yang diberikan oleh HIPPA juga menjadi penyebab enggan nya petani pengguna air untuk membayar iuran. Hal ini menyebabkan potensi konflik akibat tidak adanya keseimbangan antara hak atas pelayanan air dengan besarnya kewajiban yang dibebankan (Rachman dan Kariyasa, 2001). Potensi konflik yang lain yaitu terdapatnya moral hazard dalam pelayanan yang diberikan oleh oknum pengurus HIPPA yang membedakan penyaluran air hanya pada pemakai air yang mau membayar lebih dari petani yang lain.

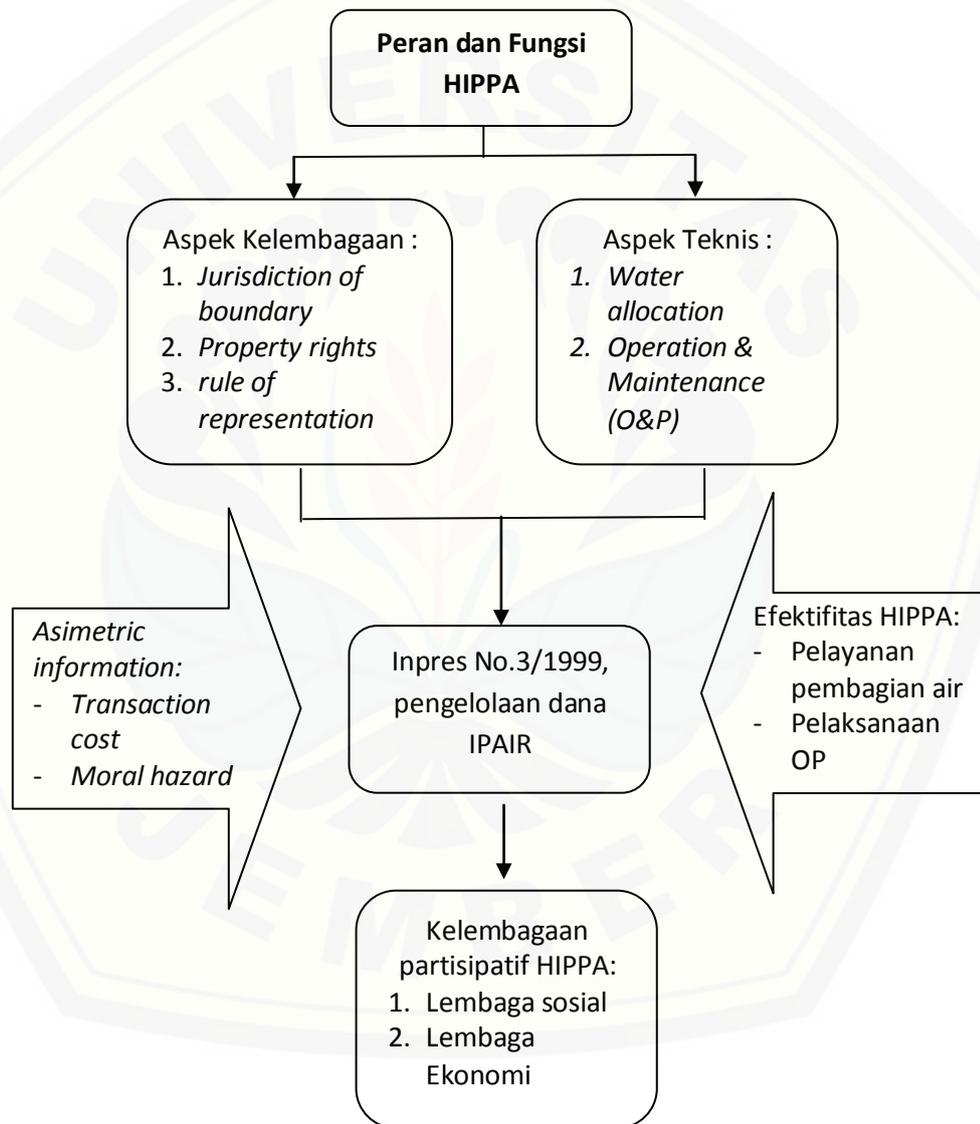
Sementara itu, siklus penyeteroran dan penggunaan dana IPAIR yang kepanjangannya berubah menjadi *Iuran Pengelolaan Air* pasca Inpres No.3/1999

yang lebih menekankan bahwa IPAIR itu “dari, oleh, dan untuk” petani pemakai air tampak dengan tahapan sebagai berikut:

- a) Petugas blok/petak sawah memungut IPAIR dari para anggotanya menyetorkannya ke bendahara HIPPA. Besarnya IPAIR ditentukan oleh HIPPA Gabungan bersama-sama Bamus Kabupaten dan Kecamatan, dan juga dengan melibatkan para petugas blok/petak.
- b) Bendahara HIPPA bertugas menyetorkan sebagian IPAIR tersebut ke HIPPA Gabungan dan besarnya sesuai keputusan yang telah disepakati
- c) Ditingkat HIPPA Gabungan selanjutnya dana IPAIR tersebut dikelola untuk dana OP dan membiaya keberlangsungan dari organisasi tersebut.
- d) Pada pola sebelum Inpres No.3/1999 kelemahnya adalah “tidak semua dana IPAIR” tersebut dikembalikan ke petani. Hal ini sangat terasa terutama pada saluran HIPPA yang tidak kebagian proyek OP, sehingga menyebabkan petani kurang bersemangat untuk membayar IPAIR. Sisi positifnya adalah pola ini bisa membiayai proyek dengan skala besar, karena dana tersebut bisa disubsidi-silangkan (*cross subsidy*) ke DI lainnya. Sementara itu, pada pola pasca Inpres No.3/1999 selain untuk membiayai kelangsungan dari kehidupan organisasi tersebut, dana tersebut hampir 100 persen dikembalikan lagi ke petani dalam bentuk OP baik untuk perbaikan dan pemeliharaan saluran primer maupun saluran sekunder. Dengan demikian terjadi transparansi dan adanya pemerataan dalam penggunaan dana OP. Pada pola ini petani merasa iuran yang mereka bayarkan memang benar-benar digunakan untuk OP dan secara nyata mereka bisa menikmati

Pemanfaatan dana IPAIR juga merupakan potensi konflik tersendiri. Besarnya dana IPAIR sering menimbulkan moral hazard sehingga pemanfaatan IPAIR tidak selalu sesuai dengan yang telah ditentukan. Hal ini menyebabkan fungsi lembaga HIPPA tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Fungsi OP tidak dapat berjalan dengan baik, demikian pula fungsi pelayanan dalam pembagian pergiliran air menjadi tidak sesuai kesepakatan. Sehingga perlu sebuah model kelembagaan HIPPA yang partisipatif dan mampu memberikan keseimbangan pelayanan hak dan kewajiban kepada petani pemakai air. Model

kelembagaan tersebut tidak hanya mengakomodir peran teknis tetapi sekaligus sebagai lembaga sosial dan ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Model kelembagaan HIPPA harus mampu menciptakan kemandirian setidaknya pada empat hal berikut : 1) Organisasi dan manajemen 2) Pengelolaan keuangan 3) Pembiayaan OP 4) Menghadapi kekuatan-kekuatan luar (Rachman dan Kariyasa, 2002)



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

BAB 3. METODE PENELITIAN

Bab 3 akan menguraikan mengenai metodologi penelitian meliputi ruang lingkup dan lokasi penelitian, metode pengambilan data, metode penentuan informan, metode analisa data, disain penelitian dan batasan penelitian.

3.1 Ruang Lingkup dan Lokasi Penelitian

Lingkup penelitian ini akan mempelajari dinamika kelembagaan HIPPA terutama yang berkaitan dengan timbulnya biaya transaksi dalam pengelolaan irigasi dan keberadaan modal sosial yang mempengaruhi keberlangsungan organisasi HIPPA. Penelitian ini akan dilakukan di Daerah Aliran Sungai Sampean Baru Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo. Penelitian akan dilakukan pada bulan Maret-September 2015.

3.2 Metode Penentuan Informan

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Pada pendekatan kualitatif lebih menekankan pada analisa pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta analisa munculnya biaya transaksi dan pengaruh modal sosial yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.

Metode penentuan informan menggunakan teknik *snowballing sampling*. *Snowballing sampling* yaitu proses pengambilan sample yang dipilih secara sengaja, kemudian dilanjutkan ke informan berikutnya berdasarkan informasi yang diberikan dari informan sebelumnya. Dalam hal ini, jumlah informan bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Pada penelitian ini peneliti menentukan informan kunci berjumlah 4 orang yaitu perwakilan pengurus HIPPA, juru pengairan, subblok dan perwakilan petani. Selanjutnya informan tambahan diperoleh dari informasi informan kunci sesuai kebutuhan penelitian yang sampai dengan akhir penelitian berjumlah 4 orang yang terdiri dari pengurus HIPPA, Subblok, petani dan mantan *lo benyo*.

3.3 Metode Pengambilan Data

Realitas sosial terlalu kompleks apabila harus dibatasi oleh instrument-instrumen, namun pembatasan hanya pada konsep analisa biaya transaksi dan pengaruh modal sosial terhadap dinamika kelembagaan HIPPA merupakan dasar yang harus diperhatikan agar pengambilan data tidak mubazir.

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

a) Observasi Partisipasi (Participant Observation)

Dalam metode ini, peneliti terlibat langsung dengan kegiatan keseharian informan. Metode ini merupakan metode pengumpulan data yang dihimpun melalui pengamatan langsung terhadap keseharian responden. Data dikumpulkan dengan cara mencatat kejadian, perilaku, perasaan dan pengetahuan responden. Data berupa catatan (*field note*) yang berisi apa yang terjadi, bagaimana terjadinya, siapa yang disana. Catatan ini dapat berisi semua kejadian atau perilaku yang dianggap penting oleh peneliti, berupa *checklist* atau deskripsi peristiwa atau perilaku tertentu. Pengamatan memungkinkan peneliti untuk memahami situasi yang rumit dan mengecek kepercayaan data serta dapat menjembatani teknik komunikasi yang sulit (Moleong, 1994, Afriani, 2009 dan Chairiri, 2009).

b) Metode Wawancara

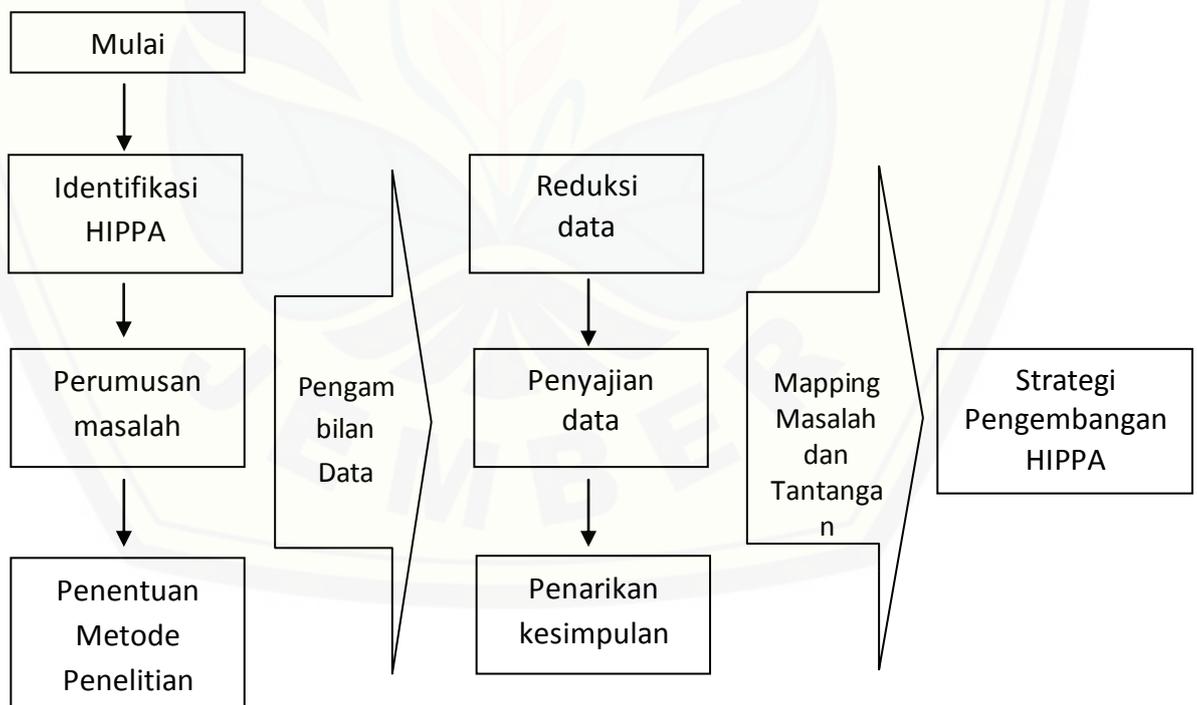
Teknik wawancara yang dipakai adalah wawancara terstruktur dan mendalam (*indepth interview*) dimana wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara namun tetap terbuka. Wawancara dilakukan dengan cara berhadapan langsung (bertatap muka) dengan informan atau orang yang diwawancarai, dan antara pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relative sama (Bungin, 2001 dan Afriani, 2009).

Motivasi penggunaan dua metode pengambilan sampel tersebut adalah peneliti bertujuan mencari informasi dengan menggali informasi sebanyak-banyaknya dari informan kunci dan informan tambahan terkait tema penelitian. Penggalan informasi bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang suatu

masalah berdasarkan sudut pandang dan pengalaman informan yang kemudian akan disusun menjadi sebuah data-data untuk dilakukan penarikan kesimpulan. Pengamatan langsung dilapangan bertujuan agar peneliti memiliki data/bukti yang kuat dan sebagai pembanding data yang didapatkan dari informan.

3.4 Disain Penelitian

Desain penelitian diawali dengan langkah identifikasi jumlah dan kondisi HIPPA di wilayah DAS Sampean Baru Kecamatan Asembagus, kemudian dilanjutkan dengan identifikasi masalah dan perumusan masalah. Setelah dilakukan perumusan masalah disusun sebuah metode penelitian untuk menjawab rumusan masalah tersebut. Setelah dilakukan pengambilan data dilapangan akan ditampilkan/disajikan data untuk memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan dan membandingkannya dengan teori empiris yang ada. Langkah-langkah pelaksanaan penelitian dapat dilihat pada diagram alur berikut.



Gambar 3.1 Disain Penelitian

3.5 Metode Analisa Data

Dalam penelitian kualitatif kondisi di lapangan merupakan hal yang sangat penting, tidak ada batasan salah atau benar, tidak dibatasi angka-angka dan variabel-variabel. Sehingga keunikan sebuah peristiwa tetap terjaga. Peneliti berusaha memahami subyek penelitiannya dengan kerangka berpikirnya sendiri (Taylor& Bogdan, 1984).

Penelitian ini menggunakan metode analisis *interactive model analysis* yang dikembangkan oleh Milles dan Hubberman. Dalam model ini menggunakan tiga komponen analisis yaitu :

a. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerderhanaan data “kasar” yang muncul dalam catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini dilakukan secara berulang-ulang dan terus menerus selama penelitian berjalan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data.

b. Penyajian data (*data display*)

Data display merupakan sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dapat membantu peneliti dalam memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.

c. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*)

Kesimpulan yang diambil akan ditangani secara longgar dan tetap terbuka sehingga kesimpulan yang semula belum jelas, kemudian akan meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan ini juga diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan maksud-maksud menguji kebenaran, kekokohan dan kecocokannya yang merupakan validitasnya.

3.6 Definisi Penelitian

Definisi operasional merupakan sebuah patokan dalam pelaksanaan penelitian dilapangan agar tetap fokus dan sesuai tema penelitian. Definisi penelitian yang terdapat dalam penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) :

HIPPA merupakan lembaga lokal yang paling dekat dengan petani dan merupakan lembaga pengelola air irigasi untuk pelayanan saluran tersier. HIPPA terdapat hampir di semua desa di Kabupaten Situbondo.

2. Perubahan Kelembagaan:

Tata kelola, norma serta aturan main (*rules of the game*) yang terdapat dalam pengelolaan air irigasi pada saluran tersier menjadi tema yang akan diteliti dalam penelitian ini. Perubahan kelembagaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perubahan aturan main dan tata kelola sejak dikeluarkannya Inpres No. 3 tahun 1999 terkait dengan pengelolaan dana IPAIR yang menjadi sumber pendanaan dalam pelaksanaan operasional dan pemeliharaan (O&P) oleh HIPPA. Perubahan kelembagaan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah aspek biaya transaksi dan modal sosial serta dampaknya bagi dinamika pendapatan petani.

3. Biaya Transaksi:

Biaya transaksi merupakan semua biaya baik *tenjible* dan *intenjible* yang terjadi dalam proses pengelolaan air irigasi. Biaya transaksi dapat meliputi semua biaya/modal yang dikeluarkan petani untuk memperoleh layanan air yang sesuai kebutuhan.

4. Modal Sosial:

Modal sosial menjadi salah satu alat analisa yang akan dipakai dalam penelitian ini. Modal sosial meliputi jaringan (*network*) serta kepercayaan (*trust*) yang terjadi dalam pengelolaan air.

5. Dinamika Pendapatan:

Perubahan pendapatan yang diterima oleh petani dari waktu ke waktu. Perubahan pendapatan yang menjadi tema penelitian adalah perubahan

pendapatan yang disebabkan oleh adanya biaya transaksi pada saat petani akan memperoleh air yang mencukupi bagi kebutuhan produksi pertaniannya.

3.7 Batasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret-September 2015 dengan mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Asembagus. Kecamatan Asembagus merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Situbondo yang dilalui oleh dua aliran sungai yaitu DAS Sampean Lama dan DAS Sampean Baru.

Fokus pada penelitian ini adalah adanya perubahan kelembagaan HIPPA yang terjadi karena dipicu oleh adanya kebijakan pemerintah melalui Inpres No. 3 tahun 1999 terkait dengan pengelolaan dana IPAIR. Kebijakan pemerintah tersebut merubah aliran iuran IPAIR dimana dalam hal ini, dana IPAIR menjadi mutlak dikelola oleh HIPPA secara mandiri sebagai sumber pendanaan HIPPA dalam pelaksanaan operasional dan pemeliharaan (O&P).

BAB 5. PENUTUP

Dari hasil analisis data terhadap fokus dan tema penelitian, maka dapat disusun kesimpulan dan saran yang akan di bahas pada subbab 5.1 dan subbab 5.2, sebagai berikut:

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa data yang diperoleh dilapangan serta pembahasan pada bab 4, maka dapat disimpulkan hasil penelitian ini yaitu:

1. Proses perubahan kelembagaan dalam pengelolaan irigasi merupakan perubahan yang terjadi tidak secara alamiah namun dipaksakan dengan adanya kebijakan pemerintah melalui Inpres No.3 Tahun 1999 terkait pengelolaan irigasi. Perubahan tersebut dapat terjadi terus menerus dan bersifat tidak tetap. Perubahan kelembagaan pada pengelolaan air dapat diuraikan sebagai berikut:
pertama terjadinya perubahan kelembagaan pengelolaan irigasi terkait biaya transaksi bersifat *non permanen* dan *continuos*. Perubahan kelembagaan masih dapat terus terjadi seiring. Faktor pemicu terjadinya perubahan dapat berasal dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur irigasi, namun dapat pula sebagai bentuk penyesuaian yang berorientasi pada kebutuhan dilapangan terkait pengelolaan air irigasi. Namun demikian, perubahan ini tidak selalu menghasilkan kelembagaan yang efisien. Hal ini terlihat dilapangan dengan munculnya *moral hazard* dari salah satu pelaku ekonomi yang memunculkan biaya transaksi pada pengelolaan dana IPAIR sesudah Inpres No.3 tahun 1999. *Kedua* perubahan kelembagaan pengelolaan irigasi terkait modal sosial bersifat *non permanen* dan *continuos*. Perubahan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh adanya kebijakan dalam pengelolaan irigasi namun juga interaksi antara petani dan lembaga pengelola irigasi yaitu HIPPA dan subblok. Dalam hal ini, kedekatan dan kekerabatan sebagai modal

sosial berimplikasi negatif terhadap transaksi ekonomi yang terjadi dalam pengelolaan irigasi. Ikatan sosial yang kuat antara subblok dengan petani yang masih berkerabat mencegah petani lain diluar ikatan tersebut untuk mendapatkan pelayanan air yang sama. Namun disisi lain, adanya modal sosial juga menjembatani proses peredaman konflik akibat adanya perebutan air diantara petani.

2. Perubahan kelembagaan pada pengelolaan irigasi yang dipicu oleh adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu melalui Instruksi Presiden No.3 Tahun 1999 telah menimbulkan tata kelola baru dalam pengelolaan irigasi. Perubahan mendasar yang dipengaruhi oleh kebijakan tersebut adalah semakin meningkatnya peran dan kewenangan HIPPA dalam pengelolaan irigasi. Hal tersebut berimplikasi pada perubahan tata kelola dan aturan main (*rules of the game*) dalam pengelolaan irigasi sebelum dan setelah dikeluarkannya Inpres No.3 Tahun 1999. Dampak perubahan kelembagaan dapat terlihat dari adanya dinamika pendapatan yang diterima oleh petani akibat adanya pengelolaan irigasi yang dipengaruhi oleh biaya transaksi dan modal sosial. Pendapatan petani dipengaruhi oleh hasil produksi panen (jumlah) serta nilai produksi panen (harga). Jumlah produksi panen sangat berkaitan dengan produktivitas pertanian, dimana ketersediaan air menjadi salah satu unsur pendukung produktivitas pertanian.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan serta kesimpulan yang telah dipaparkan diatas adalah:

1. Bagi Pemerintah:

Pemerintah sebagai pemangku kebijakan dapat mempengaruhi kelembagaan pengelolaan irigasi melalui:

- a. Penyusunan undang-undang terkait pengaturan air untuk memperbaiki tata kelola air irigasi yang berbasis pada kelembagaan lokal, untuk menciptakan pengelolaan air yang mandiri dan partisipatif.
 - b. Peraturan pemberian sanksi bagi pelaku pencurian air dan pelaku pemakai air yang tidak sesuai giliran
 - c. Pengkajian kebijakan untuk memberikan asuransi bagi petani yang mengalami gagal panen akibat kekurangan air
 - d. Penyusunan peraturan pemerintah terkait pemanfaatan dana IPAIR bagi pemeliharaan saluran sehingga petani tidak dibebani dengan biaya pemeliharaan diluar dana IPAIR.
 - e. Melakukan pembinaan teknis untuk menghitung kebutuhan air oleh petani, serta menghitung debit air yang sesuai dengan kebutuhan
 - f. Melakukan pembinaan lembaga seperti memberikan pelatihan pembuatan program kerja HIPPA
 - g. Penyusunan program reboisasi pada kantung-kantung atau sumber-sumber air
 - h. Pembahasan dan pengaturan pola tanam yang disepakati bersama dengan petani
 - i. Meningkatkan pengawasan di lapangan agar tidak terjadi kasus pencurian air dengan mengaktifkan kembali petugas penjaga pintu air
 - j. Pembentukan perkumpulan petani air (P3A) sesuai dengan budaya dan kultur masing-masing wilayah misalnya pengelolaan air yang berdasar pada sistem adat seperti sistem subak (Bali) dan keujren bleng (Aceh) yaitu dengan menggali budaya lokal seperti
2. Bagi HIPPA:
 - a. HIPPA ataupun petani untuk bersama-sama melakukan penghijauan didaerah kantung-kantung air sebagai upaya menjaga sumber air
 - b. Pengaturan distribusi air disusun bersama-sama antara subblok dan HIPPA

- c. Meningkatkan pertemuan HIPPA dan petani untuk meningkatkan partisipasi dan kemandirian HIPPA
 - d. Membuka usaha sebagai upaya mendapatkan pendapatan bagi HIPPA untuk menambah kas HIPPA
 - e. Penagihan dana IPAIR dilakukan secara kolektif oleh HIPPA.
 - f. Melaksanakan AD/ART yang telah disusun
 - g. Meningkatkan ikatan sosial diantara HIPPA dan petani dengan mengadakan kegiatan sosial bersama, seperti pengadaan arisan ataupun kunjungan anjangsana
3. Bagi peneliti atau akademisi:
- a. Perlu dilakukan studi empiris yang lebih mendalam untuk menggali unsur-unsur sosial ekonomi dan kultur yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tata kelola air irigasi untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas guna mendapatkan disain kelembagaan HIPPA yang lebih berakar pada masyarakat.
 - b. Fokus yang dapat dikaji antara lain analisis unsur-unsur sosial ekonomi yang dapat menghambat pelaksanaan tata kelola air irigasi serta analisis faktor internal dan eksternal HIPPA untuk menyusun disain kelembagaan HIPPA yang mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriani, H.S.I.2009.Metode Kualitatif. <http://kualitatif.htm.com> [28 Januari 2015]
- Arif, Sigit Supadmo., dkk. 2006. Pengembangan Konsep Sistem Operasi Dan Pemeliharaan (OP) Daerah Irigasi Multiguna Dengan Membangun Komitmen Untuk Berbuat Konsensus Antar Pelaku : Sebuah Kasus Di Jawa Timur. *Makalah kerjasama UGM dan Dirjen Sumberdaya Air Departemen Pekerjaan Umum.*
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Brousseau, Eric, et al. 2011. *Insstitutional Changes: Alternative Theories and Consequences for Institutional Design. Journal of Economic Behavior and Organization. Vol. 79: 3-19*
- Chairiri, A. 2009.” Landasan Filsafat dan Metode Penelitian Kualitatif”, Paper disajikan pada workshop Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, *Laboratorium Pengembangan Akuntansi (LPA), Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.* <http://staf.undip.ac.id/akuntansi/anis/>. [28 Januari 2015]
- Colemen, 1988. Social Capital in the Creation of Human Capital, *American Journal of Sociology*, Vol.95, Supplement: 95-120
- Darma, Rahim dan Letty Fudjadja., 2011. Penguatan HIPPA Untuk Pengelolaan IPAIR Dan Pemeliharaan Saluran Irigasi Di Kabupaten Pinrang. *Jurnal Agrisitem, Juni 2011, Vol.7 No. 1 : 21-36*
- Dietrich, Michael. 1994. *Transaction Cost Economics and Beyond: Toward a New Economics of the Firm.* Routledge. New York
- Elizabeth, R. dan Iwan S, A. 2009. Sistem Kelembagaan Komunitas Petani Sayuran di Desa Baturiti, Kabupaten Tabanan Provinsi Bali. http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdf/indfiles/MKP_B6.pdf [17 Februari 2015]
- Fatah, Luthfi. 2006. *Dinamika Pembangunan Pertanian dan Pedesaan.* Banjar Baru : Pustaka Banua
- Fauzi, Ahmad. 2004. Mencermati Implementasi UU Sumberdaya Air. <http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0403/15/opini/910328.htm>

- Ginoga, Kirsfianti., dkk. 2007. Biaya Transaksi Pengelolaan DAS Perspektif Untuk Sub DAS Cicitih. *Makalah*
- Hamdani. 1993. Prospek Pemanfaatan Irigasi Riam Kanan untuk Pengembangan Pertanian Pangan di Kalimantan Selatan. *Tesis. PPS-UGM. Yogyakarta*
- Hart, Oliver. 1995. Corporate Governance: Some Theory and Implications. *The Economic Journal*. Vol. 105, Issue 430, May: 678-689
- Hira, Anil dan Ron Hira. 2000. *The Institutionalism: Contradictory Notions Of Change. American Journal of Economics and Sosiologi*. Vol. 59 No.2, April: 267-282
- Kusumartono, Hermawan.... Sinergi Modal Sosial, Modal Fisik, Modal Manusia dan Modal Alam Dalam Pengelolaan Jaringan Irigasi Oleh Himpunan petani pemakai air (HIPPA/GHIPPA/IHIPPA) : Studi kasus daerah irigasi Cihea Kabupaten Cianjur. *Thesis. UI*
<http://lib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=75885&lokasi=local>
[17 Februari 2015]
- Manig, Winfried. 1991. *Structural and Institutional Changes in Rural Northwest Pakistan. The Journal Of Development Studies*. Vol. XII: 1-20
- Mburu, John. 2002. *Collaborative Management of Wildlife in Kenya : An Empirical Analysis of Stakeholders Participation, Costs and Incentives. Socioeconomic Studies on Rural Development*. Vol. 130, Wissenschaftsverlag Vauk Kiel KG
- Miles, M.B & Huberman, A.M. 1992. *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook Of New Methods*. California: Sage
- Moleong, Lexy J. 1994. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- North, DC. 1990. *The New Institutional Economics and Development*.
<http://www.qed.econ.queensu.ca/pub/faculty/lloyd-ellisecon835/readings/north.pdf>
- . 1994. *Economic Performance Through Time. The American Economic Review*. Vol. 84, Issue 3, June : 359-368
- Pranadji, Tri. 2006. Penguatan Modal Sosial Untuk Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Dalam Pengelolaan Agroekosistem Lahan Kering. *Jurnal Agro Ekonomi*, Volume 24 No 2, Oktober 2006 : 178-206

- Rachman, Benny dan Ketut Kariyasa., 2002. *Dinamika Kelembagaan Pengelolaan Air Irigasi. Laporan Tekhnis Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian*. Bogor
- Rachman, Benny. 2009. Kebijakan Sistem Kelembagaan Pengelolaan Irigasi: Kasus Provinsi Banten. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*. Volume 7 No.1, Maret 2009: 1-19
- Rina, Yanti. 2012. Dinamika Kelompok Persatuan Petani Pemakai Air Di Lahan Rawa Pasang Surut. *Makalah dipresentasikan Seminar Nasional : Kedaulatan Pangan dan Energi 2012*. Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo. Madura
- Rossiaud, Sylvain and Catherine Locatelli. 2010. *Institutional Economics. Polinaries Working Paper. No.12*
- Saadah, Rahim Darma dan Mahyuddin., 2012. Unsur-unsur Pembangunan Dalam Pengelolaan Pengairan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 13, Nomor 1, Juni 2012, hlm. 18-28*
- Sedana, Gede. 2012. Modal Sosial Dalam Agribisnis Subak (Kasus pada Koperasi Usaha Agribisnis Terpadu Subak Guama, Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan). *Jurnal Ilmiah, ISSN: 1979-3901*. Sedanagede.blogspot.com/2012/03 [17 Februari 2015]
- Sitompul, Dessy S.U, Meneth Ginting dan Emalisa., 2012. Sikap Petani Terhadap Himpunan petani pemakai air (HIPPA).
- Sumaryanto., 2006. Peningkatan Efisiensi Penggunaan Air Irigasi Melalui Penerapan Iuran Irigasi Berbasis Nilai Ekonomi Air Irigasi. *Forum Penelitian Agro Ekonomi, Volume 24 No.2, Desember 2006 : 77-91*
- Suparmoko. 1980. Pengembangan Pengairan Dalam Strategi Pangan. *Prisma No. 10 hal 37-47. LP3ES. Jakarta*
- Torang, Syamsir., 2011. Saling Hubungan antara Lingkungan Eksternal dan Lingkungan Internal Himpunan petani pemakai air. *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, Vol. 24, No.1, Januari-Maret 2011 : 52-60*
- Vatn, Arild. 2006. *Institutions. Departement of Economics and Resource Management Norwegian University of Life Sciences*. [http://www.ecoeco.org/pdf/Institutions Arild Vatn.pdf](http://www.ecoeco.org/pdf/Institutions%20Arild%20Vatn.pdf) [28 Januari 2015]
- Yeager, Timothy J. 1999. *Institutions, Transition Economies, and Economic Development*. Political Economy of Global Interdependence. Oxford

Yustika, Ahmad Erani. 2012. *Ekonomi Kelembagaan : Paradigma, Teori, dan Kebijakan*. Erlangga



LAMPIRAN I. CUPLIKAN HASIL WAWANCARA

1. Wawancara dengan Bapak Hd (Subblok)	
Peneliti	: Napa lakona subblok mon bejena bede aing?
Informan	: Nolongi ngator aing ka sabe'en gerua Pak, norok norap kia ka Sabena
Peneliti	: Ikut ngawal air ka saluran? Notop2 aing juga?
Informan	: iya ngawal, enten tak norok notop2 labeng Pak
Peneliti	: Subblok olle informasi aing, jek aing deteng gerua deri sera?
Informan	: Deri jeregen Pak, juru nika
Peneliti	: Info jumlah aing se deri juru nika napa kolako teppak? Sesuai bik aing se deteng?
Informan	: Se jellas bede korangnga Pak, kan bennyak labeng nika..
Peneliti	: Berkurangnga anapa?
Informan	: Enggih polana bennyak labeng-labeng gerua Pak, meste korang pon aingnga
Peneliti	: Apa subblok punya jadwal tanam dari petani?
Informan	: Enggih bede Pak, kan mon nimberek meste padi, mare gerua jegung, marena jegung nika pas cabbii..teros pon cabbii sampek nimberek
Peneliti	: Ada catatan tertolesa?
Informan	: Sobung Pak, pon genika deri kebiasaan pon..umumma ngak genika
Peneliti	: Selama masa pembagian air apa ada kendala?
Informan	: Sobung Pak, Alhamdulillah kaule bisa ngatasi..
Peneliti	: Mon nimberek kan meste lebbi? Mon nimor beremma Pak?
Informan	: Mon nimberek enggih bi talebbih aing Pak, mon nimor pon dimaklumi bik Petani. Kan pon oning petani jek aing kenik deri adek pon.sambi kan pon tanemanna tak buto aing bennyak
Peneliti	: Saompama ada kekurangan air, sampean sebagai subblok nika ngtasinya dengan beremma?
Informan	: Enggih ejenji'i aing se edetenga Pak
Peneliti	: Antar petani tak rebbuen aing Pak?
Informan	: E susun pon Pak torapanna, e gilir pon..misalla si A norap samangken, e detenga gentiyan si B. Si A tak olle norap pole pon kan pon lastare. Nyamana genika "Gigi Beleng"
Peneliti	: Giliran genika perak empeyan se ma bede napa subblok se laen kia?
Informan	: Enggih pade Pak, keng mon luas areana raje gillu gi tak cokop Pak. Enggih a jenji gerua pon.
Peneliti	: Apa subblok mengalami kesulitan dalam pengumpulan iuran air? Beremma carana?
Informan	: Buntan Pak, kadeng e bejer lastare panen. Mon se tak andik gih kadeng e jenji'. Polana panen samangken tak mole Pak,

		kadeng bede se e kabelliye buthok tape se e kabejerre ka subblok sobung. Gi pangarte pon.
Peneliti	:	Mon se majere langsung bede?
Informan	:	Enggih bede, e bejer lastarena norap pon.
Peneliti	:	Beremma carana majere?
Informan	:	Bede se nyander ka ento (compok), kadeng gi majer e sabe'en
Peneliti	:	Berarti subblok sobung kesulitan gi ngumpulkan iuran?
Informan	:	Sobung Pak
Peneliti	:	Majerre sanapa Pak? Bayar itu tiap air masok?
Informan	:	Majerrre per lokke', bede se 20.000 bede se 25.000
Peneliti	:	Penentuan reggena sera se nentu agi?
Informan	:	enggih deri petani dibik Pak, sa ikhlassa
Peneliti	:	Benni deri HIPPA gi?
Informan	:	bunten Pak, cakna petani bik subblok pon, pokok bitonganna lokke'an
Peneliti	:	Salokkek nika okoran sanapa?
Informan	:	E ka'enje Pak okoran 400 deddi nem enem. Bede legge bede copek Pak
Peneliti	:	Saumpama Pak, satiya gilirena saya se e torap. Pas saya tak bisa majer? Apa ada sanksinya buat petani yang gak bayar?
Informan	:	enten paggun e torap, majer marena pon ereken aotang. Bede se aberrik panen Pak
Peneliti	:	Pesse se deri petani kan e pekompol ka subblok, pas epaka'emma?
Informan	:	Deri subblok gi ka pihak pelaku Pak, kaule kan andik anak buah Pak. Gi ebegi ka se alako, ka tokang torap gerua pon Pak.
Peneliti	:	Empiyan negguk sanapa oreng?
Informan	:	39 oreng Pak
Peneliti	:	itu tiap a kompol aing olle pesse sanapa kera2 tiap aing deteng?
Informan	:	kadeng 850-900
Peneliti	:	Tokang torapp olle berempan genika Pak?
Informan	:	kadeng e berrik 250 an Pak, karena dik kaule
Peneliti	:	Biaya ngawal aing deri ka'emma?
Informan	:	gebey ngawal aing gih deri iuran kia Pak, 150 majer ka juru, a bele kaule ka tokang torap
Peneliti	:	Tadhek dana se masok ka HIPPA?
Informan	:	kadeng a berrik 30-50, tadhek ketentuan deri HIPPA
Peneliti	:	Empiyan deddi subblok pon abit?
Informan	:	olle 2 tahonan
Peneliti	:	Empiyan molae lambek pernah alako sabe? Napa jet bede pesse iuran aing?
Informan	:	enggih bede Pak
Peneliti	:	Molae 90 an jet bede, majer ka sera?

Informan	:	Ka subblok pak, molae lambek ngak nika pon
Peneliti	:	Mon bede saluran se gujur tabe rusak, sera se mateppak? Olle ka'emma pessena?
Informan	:	enggih kaule Pak, nyoro oreng. Pessena minta oronan ka petani. E loar pesse torapan
Peneliti	:	Apa pernah terjadi ada petani yang melanggar kespakatan pembagian air?
Informan	:	selama e tegguk kaule, sobung Pak. Mon dhimin gi bede Pak petani se cok ngicok.
Peneliti	:	Ada sanksi ka petani?
Informan	:	Sobung pak, perak e belie gerua pon.
Peneliti	:	Mak bisa terjadi samangken sobung lambek bede?
Informan	:	Sobung pak, aingnga mennang. Tak kakorangan aing mon se laju kakorangan aing Pak
Peneliti	:	Mak bisa lambek kakorangan aing?
Informan	:	Kadeng kan deri norappa, aing kan padhe e lobengi pak. Deddi aing kenik. Mon kaule, perak e padeddi 3 sokso, deddina aing raje pak. Tempona aing dinas, mon aing temor kaule gi majer pak. A bele ka petani, deddina petani majer.
Peneliti	:	Ka tong settongnga petani, empiyan kenal pak?
Informan	:	enggih kenal pak, roco kan bennyak reng ka'ento pak
Peneliti	:	Apa ada hubungan saudara tabe keluarga?
Informan	:	enggih bede beberapa se ning nginning
Peneliti	:	napa bede perbedaan perlakuan?
Informan	:	enten sobung pak, gi paggun sesuai giliranna Pak. Kan pas e protes kaule bik petani se lain pak mon tak adil.
Peneliti	:	Ka petani empiyan semmak pak?
Informan	:	Gi mon bede petani sakek, gik nyapot Pak. Mon komantanan kan meste e undang Pak, jereng tatangge ka'enje.
Peneliti	:	Empiyan sabben sebagai petani, pernah ngalami kakorangan aing?
Informan	:	enggi pak, korang aing. Majer Pak keng tak e torap. E jengi'I malolo.
Peneliti	:	Cakna petanina bede se majer gebbeh? Bisa?
Informan	:	enggih bisa Pak, genika istilana panggubuk. Mon majer panggubuk tak usah majer ben norap. Tape genika coma khusus MT 1 pas bekto padi.
Peneliti	:	sanapa pak majerre?
Informan	:	satu mon panen olle 10 sak, 1 sak genika gebey kaule. Sekitar 10% pon..
Peneliti	:	Kemma nyaman pak?
Informan	:	gi nyamanan majer pesse. Mon bede biaya penjagaan kan ngalak deri ka'emma pesse?
Peneliti	:	bennyak gi pak se majer ngak genika?
Informan	:	enggih se mak semmak gerua perak pak, mon se jeu kan niser

		nong tongnga jeu
Peneliti	:	Beremna carana empiyan magi gebbeh na genika?
Informan	:	genika perak gebey kaule ben tokang torap, enggih tokang torap olle 20 %nan kaule olle 40%nan..
Peneliti	:	Tau gak uang dari hippa dikemanain?
Informan	:	tak saya pak tau
Peneliti	:	Tapi rutin ngasih ya pak? Ka sapa ngasihnya?
Informan	:	Iya rutin. Ka ketua na
Peneliti	:	Bede pembukuanna?
Informan	:	Sobung ni
Peneliti	:	Ada gak hippa pernah ngasih uang ke dia untuk bantu biaya perbaikan saluran?
Informan	:	gak ada, mon bede perbaikan saluran petani na oronan kadeng gi kerja bakti
Peneliti	:	Brp iuran yg dibayar petani untuk perbaikan saluran?
Informan	:	Sabutona e lapangan, pokokna bede karosakan gi gotong royong sombengan
Peneliti	:	Dalam satu musim, petani dpt giliran berapa kali?
Informan	:	Klo musim hujan bisa 10 hari sekali genika air dinas, lain se deri ampongan, mon MK1 antara 10-20 hari , MK2 20-30 hari..tergantung bedena aing
Peneliti	:	Misalnya ada petani yang punya giliran norap, tapi ada petani lain yg mau bayar lebih banyak. Apa bisa diganti ke petani lain?
Informan	:	Enggih bisa pak, ninggu kondisi tanamen pak,,mon bisa e tunda gi e tunda lun begi ka se majer..tape mon tak bisa gih tak e tunda..jebe mon bede rekarena aing buru e berrik. Petani ka'enje te ngarte pon pak ka kondisi aing ka'enje, mon dila gilirena norap 4 kotak perak olle 2 kotak narema genika pon.
Peneliti	:	Pas pessena beremna pak?
Informan	:	Enggih paggun majerre pak, ekalak kabbi
Peneliti	:	Aing temor itu apa?
Informan	:	Air giliranna juru se temor, kaule gerua ngampong
Peneliti	:	Bayar ke siapa?
Informan	:	Ke orang timur pak, orang kepercayaan giliran itu da.
Peneliti	:	Trus, ke petaninya minta bayaran lebih tinggi gak dari biasana?
Informan	:	Enggih pak tergantung kondisi aing

2. Wawancara dengan Bapak Mz (Petani, 17 th bertani)

Peneliti	:	Brp luas tanah bapak?
Informan	:	1 Ha
Peneliti	:	Kebutuhan air sawah, semuanya diambil dari sampean baru?
Informan	:	iya

Peneliti	:	Apa dulu juga sudah ada HIPPA pak?
Informan	:	Belum Pak, dulu adanya itu pangolo aing, <i>ulu-ulu</i> aing itu. Se nunjuk ya Petani tapi Dinas Pengairan harus setuju. Kalau ndak setuju ya ndak bisa. Kan ndak gampang pak ngurus air.
Peneliti	:	Apa dari dulu memang bayar iuran Pak? Sebelum ada HIPPA?
Informan	:	Lupa saya Pak, saya bertani sejak tahun 1998 nan masse..itu majer da. Tapi mon jaman bapak saya, masse gak bayar itu. Polana kan <i>ulu-ulu</i> air itu masok karabet disa, olleh tanah disa. Tape gi kadeng aberrik sa ikhlassa gerua.
Peneliti	:	Apa air sudah sesuai kebutuhan petani?
Informan	:	Selama 17 tahun, mengalami beberapa kali ganti subblok. Setiap subblok punya aturan beda-beda. Yang subblok sekarang, sesuai pak. Kalo yang dulu-dulu Cuma disanggupi, dijanjiin tapi air gak masuk. Uang masuk
Peneliti	:	Kalo yang dulu-dulu, kok gak sesuai kenapa kira-kira menurut bapak?
Informan	:	Kalo jumlah aing kan tetap pak dari dulu sampek sekarang, ya mungkin di pembagian airnya itu..
Peneliti	:	Klo bapak mengalami kekurangan air, gimana solusinya?
Informan	:	Dijanjikan yang akan datang pak
Peneliti	:	Tanamannya mati gak?
Informan	:	enggak kuat, karena nanemnya palawija
Peneliti	:	Klo pas air datang juga belum ditorap, gimana?
Informan	:	Ya pernah pak, tager deddi tanah itu da..
Peneliti	:	Seberapa sering itu terjadi?
Informan	:	Sesekali bei pak, pas musim kemarau saja
Peneliti	:	Petani rutin bayar iuran?
Informan	:	Iya rutin pak, klo disini ada tiga kriteria pak..1) mon musim ojen itu ya 15-20 rb, 2) ada subblok yg nentukan, sekitar bulan 4 itu ya 25 3) mon musim nemor itu, yg bulan 10 keatas itu cakna subblok pak..kadeng minta 40 kadeng 50.
Peneliti	:	Iuran yang sampeyan bayar sama air yang masuk apa seimbang?
Informan	:	Cakna hasil panenna pak, misalnya pas kriteria ke 3 tapi nanam jagung ya rugi pak, iuranna kan larang. Tapi klo kriteria ke tiga pas nanem cabbi ya ontong pak. Tergantung tanemmanna, tapi klo disini rata wes pak, musin nemor ya nanem cabbi da
Peneliti	:	Sebelum-sebelumnya Bapak juga bayar iuran?
Informan	:	iya saya kan pendatang pak, sejak saya mulai bertani disini ya bayar da.
Peneliti	:	Apa ada perubahan jumlah uang tiap tahun?
Informan	:	Iuran air itu tergantung subblok, sudah ada kesepakatan bersama. Petani sudah tau.

Peneliti	:	Subblok yang lama (sebelum yang sekarang) ?
Informan	:	endak dak ada perubahan iuran. Mon dulu ya mode pak, tape kan harga sembako juga murah. Naiknya itu ya ngikutin harga da, tape bebrapa tahun ini gak berubah.
Peneliti	:	Berarti gak selalu naik ya Pak?
Informan	:	endak pak
Peneliti	:	Kalo misalnya skrg bukan giliran bapak norap, tapi bapak butuh norap, apa bayarnya perlu nambah?
Informan	:	ya itu cakna subblok da pak, kadeng ya norok kriteria biasana. Pokokna bayar da narema beres
Peneliti	:	ada tambahan biaya?
Informan	:	Pokokna lebbih i raje napon pak deri se gilirena
Peneliti	:	Pas petani se gilirena aing beremma?
Informan	:	kan belum tentu e berrik pak..gi gerua pon orosanna subblok
Peneliti	:	Selama jadi petani, apa pernah kareggingan masala aing ka petani lain?
Informan	:	iya sering pak, kadeng gini..pas bede e kriteria ketiga, petani nanem jegung kan tak endhek itu majer polana larang. Jadi bik subblok, dioper ka petani laen se buto pas endhek majer pak. Mon se lambek itu pak, banyak yang komplain. Misalla, si A yg selalu ditorap. Seggut itu saingan Pak, seandainya selain bayar 50 tape bik saya e tambei 50, saya se olle aing pak. Deddi itu ada sembunyi2 tu pak.
Peneliti	:	oh berarti, empiyan majer lebbih tenggi deri sebelana?
Informan	:	Iya pak, saya berani bayar mahal makle olle aing Pak
Peneliti	:	Apa berpengaruh kemudahan mendapat air terhadap jumlah produksi?
Informan	:	endak pak, gik paggun tergantung harga. Kadeng aing bede tapi mon reggena jubek gi paggun rogi.
Peneliti	:	Maksudnya ka jumlana gerua pak?
Informan	:	Eggih ngaruh pak, mon aing lancar kan begus ka tanaman,,sebiasana olle 5 ton mon aing jubek gi bisa perak 4-3,5 ton
Peneliti	:	seumpama pas kemarau, sampeyan nanem cabe, brp hasilnya?
Informan	:	klo cabe perhitungannya satu minggu panen, sampek hujan itu turun paggun produksi. Pokokna selama tak mate ya saya terrossagi.
Peneliti	:	Kira-kira brp ton?
Informan	:	2,5 kwintal per minggu. Sampek 32 kali panen saya panennya
Peneliti	:	Harganya pak?
Informan	:	Tak tentu pak, tadi saya mare panen hargana 32000, sebelumma padahal 50.000. Tapi ya pernah panen awal-awal 4000-5000, selama 3 bulan itu. Pas naik-naik terus, kadang naik 5000 tiap panen, terus sampek harga 50-70, trs turun pole.

Peneliti	:	Klo nanem padi dapat brp?
Informan	:	Padi disini bagus Pak, Cuma yg tahun ini gagal pak, karna alam yg nentukan. Karna panyakek.
Peneliti	:	Mon tak gagal?
Informan	:	10 sak salokkek, 1 sak 65 kg gabah kereng, se mare e jemmor benni sederi sabe nika Pak. Rata-rata petani disini, gabah langsung di tandung dak dijual. (disimpan sendiri)
Peneliti	:	berapa kaluarra?
Informan	:	olle 2:1 pak, maksotta delem 2 sak olle sa gintal pak berresse. (gabah se mare e jemmor)
Peneliti	:	Norap itu berapa hari sekali?
Informan	:	Tergantung musim dan apa yg ditanam Pak. Mon padi ya tiap minggu norap, nanemna kodu musim hujan.
Peneliti	:	Klo diatas bulan 4 gmn?
Informan	:	Kalau nanam jagung, itu dua minggu sekali pak.harus dapat air.
Peneliti	:	Kalo cabe, butuh brp kali?
Informan	:	Sama pak, seminggu sekali.
Peneliti	:	berapa biaya produksinya pak?
Informan	:	Cakna namenna Pak, mon padi sekitar 825 rb per lokkek.
Peneliti	:	Iuran aingnga beremma?
Informan	:	Mon 10 sak, 1 saknya buat subbloknya
Peneliti	:	Mon jegung berempa biayanya?
Informan	:	tergantung bibitnya, lebih murah deri padi.
Peneliti	:	Berapa perbandingan antara biaya iurn air dg hasil panen?
Informan	:	sekitar 10% dari hasil panen. Jadi kalo hasilnya 5 juta, ngasih ka subblok itu ya 500rb.
Peneliti	:	Mon nanem jegung?
Informan	:	Ya majer setiap norap pa, iuranna ya tergantung musim air, norok kriteria se gellek pon.
Peneliti	:	Empiyan kenal ka petani lain?
Informan	:	enggih kenal pak
Peneliti	:	Ka subblok?
Informan	:	Enggih kenal kia Pak, roco.
Peneliti	:	Ada perbedaan perlakuan gak pak, antara yg kenal sama yg tidak?
Informan	:	Kalo yang sekarang endak Pak, sama. Klo yg dulu, iya memihak Pak. Mon se kenal dekat se bisa majer raje, genika se eberrik aing. Tekkak semmak mon tak bisa majer, enggi tak e berrik Pak.
Peneliti	:	oh berarti benni polana semmak gi?
Informan	:	tergantung pessena Pak
Peneliti	:	Apa bapak tau uang iuran air itu jalannya kemana?
Informan	:	Dak tau Pak, itu kan sudah jadi urusanna subblok
Peneliti	:	Apa bapak pernah ikut rapat petanggung jawaban iuran

		HIPPA?
Informan	:	endak Pak, dak pernah ada.
Peneliti	:	Apa petani pernah diikutsertakan dalam pembuatan AD/ART HIPPA?
Informan	:	endak Pak, tak pernah norok saya
Peneliti	:	Apa bapak pernah ikut rapat petanggung jawaban iuran HIPPA?
Informan	:	endak Pak, dak pernah ada.
Peneliti	:	Apa HIPPA rutin ngadakan rapat anggota?
Informan	:	endak, dak pernah ada. Kalo di awar2 itu sering..
Peneliti	:	Apa bapak sebagai petani merasakan manfaat adanya HIPPA?
Informan	:	setau saya, saya terimana beres masalah aing ya deri subblok. Deri dulu saya gak pernah tau siapa itu HIPPA na. Orosan aing ka subblok benni ka HIPPA
Peneliti	:	Berarti sobung manfaatta gi Pak?
Informan	:	Dak ada Pak
Peneliti	:	Harapanna Bapak thdp HIPPA?
Informan	:	HIPPA bisa berfungsi sebagaimana mestinya, sesuai AD/ART

3. Wawancara dengan Bapak Im (HIPPA)

Peneliti	:	Apa peran Bapak dalam kepengurusan HIPPA?
Informan	:	Saya ketuana
Peneliti	:	Apa HIPPA bikin AD/ART setiap tahunnya?
Informan	:	Gak pake yang lama itu pak
Peneliti	:	Ada pak yang lama? Kapan itu bikinnya?
Informan	:	Ada, gak tau saya lupa itu da Pak. Saya kan neruskan-neruskan
Peneliti	:	Bapak sudah berapa lama jadi ketua?
Informan	:	dua tahunan itu da
Peneliti	:	berarti selama jadi ketua gak pernah bikin ya pak
Informan	:	entenni sobung
Peneliti	:	Bagaimana proses pemilihan ketua dan pengurus
Informan	:	Ketua dipilih sama kepala desa, pengurus dipilih ketua
Peneliti	:	Berapa periode kepemimpinan HIPPA pak?
Informan	:	Lima tahunan pak, mon e gentea tape mon enten gi paggun ka selaju
Peneliti	:	Apa program-program tahun ini dan tahun sebelumnya?
Informan	:	ya itu da pak yang ada di AD/ART, mengatur pembagian air, pelayanan ke petani, merawat plengsengan. Gitu da Massena.
Peneliti	:	Apa program-program tersebut sudah dilaksanakan? Apa kendala?
Informan	:	ada yg sudah ada yang gak. Kendalanya karena HIPPA na saya belum berbadan hukum.
Peneliti	:	kok bisa jadi kendala?

Informan	:	klo berbadan hukum kan belum kuat itu pak. Masalana kadeng kekuatan HIPPA lebih kuat subblok
Peneliti	:	Begh mak bisa pak?
Informan	:	Panningnga HIPPA nika se ngangkat kan kepala disa pak, mon subblok se milih kan petani ngangguy pilihan
Peneliti	:	Pilihan engak patenggiyen geruwa gi?
Informan	:	Enggih, bisa a raje'en peleyan se subblok.
Peneliti	:	Pengurus-pengurus yang lain gmn Pak?
Informan	:	sekedar pengurus itu da
Peneliti	:	sekedar bedede nyama itu?
Informan	:	iya..perak bedede nyama
Peneliti	:	Apa kendala yang dialami HIPPA dalam pelaksanaan peran O&P?
Informan	:	Ya itu tadi, belum berbadan hukum itu pak. Jadi gak bisa bergerak bebas. Pas giliran aing geruwa kan biasana HIPPA di depan, ini endak pak subblok se e adek.
Peneliti	:	Maksotta beremma genika pak?
Informan	:	Subblok se ngatur pon..deri pembagian aing sampek ka pembagian pessena. Deddi narema rantana kaule pon.
Peneliti	:	Sudah ngurus yang berbadan hukum?
Informan	:	Belum pak, sobung biayana.
Peneliti	:	Subblok nyettor pesse ka HIPPA?
Informan	:	enggih nyettor sepat giliran aing. Kadeng 50, kadeng 100..
Peneliti	:	Berarti HIPPA endik kas gi pak?
Informan	:	Koduna bedede pak, tape mon perak 50-100 kan gebey kaule pon sobung
Peneliti	:	Jenuwa empiyan endik subblok berempa?
Informan	:	lalemak masse
Peneliti	:	Kan pon 500 rb genika pak? Sobung semasok ka kas?
Informan	:	enggi mon majer kabbi pak, kan tak majer kabbi. Kan tak norok a lako kaule.
Peneliti	:	Sejak kapan HIPPA mengelola dana IPAIR sendiri?
Informan	:	Gih sobung pak, kan sobung kas sa..enggih HIPPA mon perak buto2 fotocopi enggih deri kaule pon. Panyittong
Peneliti	:	Bapak nyettor ka kepala desa?
Informan	:	enten pak, du aberrik e napa na
Peneliti	:	Lambek beremma pak? Sera se negguk iuran aing?
Informan	:	saoningnga kaule majer, keng loppa kaule majer ka sera. Deri lambek pon majer aing, kaprana sobung aing gratis pak.
Peneliti	:	Se mateppak saluran gerua sera Pak? HIPPA?
Informan	:	Enten tak mateppak, kan pon bedede petani bik subblok..oronan gerua pon. Mon mateppak plengsengan gerua dentek dana deri pamarenta
Peneliti	:	Mon akhir tahun sobung laporan? Pemakaian dana se e settor subblok gerua?

Informan	:	koduna bedede, tape sobung ni pak..
Peneliti	:	nika berarti HIPPA na tak ajelen gi?
Informan	:	enggih a jelen pak, gi ngak nika na pon..kan mon tak ajelen kan pas sobung nyaman HIPPA. Nika kan gik bedede.
Peneliti	:	Empiyan nyettor sanapa ka GHIPPA?
Informan	:	enten sobung. GHIPPA genika kan tak ajelen genika, perak nyama malolo genika
Peneliti	:	Apa HIPPA rutin ngadakan rapat?
Informan	:	enten pak, du napa na se erapat agina
Peneliti	:	Apa HIPPA punya usaha mandiri?
Informan	:	sobung pak..

4. Wawancara dengan Bapak Sw (Subblok) (2)		
Peneliti	:	Napa lakona subblok mon bejena bedede aing?
Informan	:	Nolongi ngator aing ka sabe'en gerua Pak, mamasok aing ka lokke'an na sabe genika pon.
Peneliti	:	Ikut ngawal air ka saluran? Notop2 aing juga?
Informan	:	enggih norok ngawal, enggih pak e bento pajegenana aing
Peneliti	:	Subblok olle informasi aing, jek aing deteng gerua deri sera?
Informan	:	Aing deteng kan pon paste, pon bedede gilirena. Raje kenikna aing gi deri juru.
Peneliti	:	Info jumlah aing se deri juru nika napa kolako teppak? Sesuai bik aing se deteng?
Informan	:	Enggih teppak, kaula kan tak oning ngitong..pokokna pon bedede na aing genika pon..
Peneliti	:	empiyan oning ka aeng se detengnga?
Informan	:	Enggih tak oning, kan tergantung bedena ojen e bendung tapen.
Peneliti	:	Apa subblok punya jadwal tanam dari petani?
Informan	:	Enggih bedede Pak, kan e berrik juru. Nyamana RTTG
Peneliti	:	Napa genika RTTG? Ada catatan tertolesa genika?
Informan	:	enggih bedede, genika pon e ator. Mon MT1 genika bisa nanem padi kabbi tabe padi bik tebbu, mon MT2 genika bedede se padi bedede se jagung bedede se tebbu pon, mon MT3 genika bedede se padi bedede se tebbu bedede se tak etanemmi.
Peneliti	:	Jadwalla genika sesuai bik se elapangan?
Informan	:	bedede se sesuai, bedede se entan pak. Polana se padi perak se labeng adek genika, kadeng gi jegung perak takok tak nutut aingnga.
Peneliti	:	Selama masa pembagian air apa ada kendala?
Informan	:	Biasa senyamana lako kan meste bedede kendalana. Kendalana e aing korang ginika pon.
Peneliti	:	Mon nimberek kan meste lebbi? Mon nimor beremma Pak?
Informan	:	Mon nimberek enggih bi talebbih aing Pak, kadeng e bueng. Mon MT 2 genika gi deng seddeng pon. Mon MT3 genika gi

		sara aing tak cokop, deddi kodu bede sengala. Sabe-sabe se jeu enggi tak e torap genika. Tak etanemmi kadeng
Peneliti	:	Tak rogi gi pak mon tak etanemmi?
Informan	:	enten pak, tembeng e tanemmi tak olle hasil. Kan belik tak e tanemmana tak makeluar bende
Peneliti	:	Saompama ada kekurangan air, sampean sebagai subblok nika ngtasinya dengan beremma?
Informan	:	Ngarte genika pon petani, gi beremma pole mon pon tadhek aing.
Peneliti	:	Antar petani tak rebbuen aing Pak?
Informan	:	enggih a rebbu pak, kan meste terro e torapa. Tape kan kaule se ngator aing.
Peneliti	:	Giliran genika perak empeyan se ma bede napa subblok se laen kia?
Informan	:	enggih bede pak, kabbi a gebey. Mon pas korang aing kan kodu bede jadwalla.
Peneliti	:	Apa subblok mengalami kesulitan dalam pengumpulan iuran air? Beremma carana?
Informan	:	bede se gempang, gih bede se serret. Gih mon tak majer tak e torap pon.
Peneliti	:	berarti majer ka'adek gi pak?
Informan	:	enggih pak, mon majer e budi kaule tak nemmo se akabejere ka begien penjagaan aing, se ajege e labeng aing genika.
Peneliti	:	Beremma petani carana majere?
Informan	:	Gi majer sekencengnga pon, sakatemmona pon pak.
Peneliti	:	Berarti subblok sobung kesulitan gi ngumpulkan iuran?
Informan	:	Sobung Pak
Peneliti	:	Majerre sanapa Pak? Bayar itu tiap air masok?
Informan	:	Majerrre per lokke', MT1 genika majer paleng raje pon 20.000, mon MT2 genika 30.000 an genika pon, pas mon MT3 gi sekitar 40.000.
Peneliti	:	Penentuan reggena sera se nentu agi?
Informan	:	enggih genika kesepakatan petani bik kaule..kaprana genika pon. Tekkak mosem ojen gi majer, kan niser ka kaule mon tak e bejer.
Peneliti	:	Benni deri HIPPA gi?
Informan	:	bunten Pak, HIPPA tak norok napa pon..perak bek nyalembek genika, mon ding e julluwi pesse mole pon. Ka'enje nika subblok se nengguk peranan pon.
Peneliti	:	Ka'enje sobung se majer pang gubuk?
Informan	:	Mon e subblok kaule nyalaje pesse, polana mon panggubuk ollena sakonik.
Peneliti	:	Saumpama Pak, satiya gilirena saya se e torap. Pas saya tak bisa majer? Apa ada sanksinya buat petani yang gak bayar?
Informan	:	enggih tak e torap genika pon. Sanksi napa na..

Peneliti	:	Pesse se deri petani kan e pakompol ka subblok, pas epaka'emma?
Informan	:	Genika enggih gebey kaule Pak, gebey tokang torap, gebey penjagana aing, gebey ngakan nginom genika pon. Ka'enje bede 2 oreng tokang torap, katello bik kaule.
Peneliti	:	Penjagana aing genika sera maksotta?
Informan	:	Penjagana aing genika gih se ngawal aing deri bendung sampek ka saluran gerua Pak. Kan majer oreng kaule, mon tak e kawal takok e kecok oreng Pak aingnga.
Peneliti	:	Empiyan negguk sanapa oreng?
Informan	:	30 oreng Pak
Peneliti	:	itu tiap a kompol aing olle pesse sanapa kera2 tiap aing deteng?
Informan	:	kaule neggu 36 Ha, genika mon beje mangken MT3 Norappa e gilir 3 kale. Deddi kaule satorapan genika perak 12 Ha, deddi 120 lokkek. Genika pon kale 40rb per lokkek, gi sekitar 4000 lebbih.
Peneliti	:	Tokang torapp olle berempa'an genika Pak?
Informan	:	Kaule olle 2000, tokang torapp 1000 an due'en, penjagaan aing 500, HIPPA genika kadeng 50 kadeng 100. Tape nika nyator pesse pak jek padepak ka dhimma dhimma pak, cokop empiyan se tao pak..kaule perak mukkak ka empiyan nika.
Peneliti	:	Empiyan deddi subblok pon abit?
Informan	:	olle 2 tahonan.
Peneliti	:	Empiyan molae lambek pernah alako sabe? Napa jet bede pesse iuran aing?
Informan	:	enggih bede Pak
Peneliti	:	Molae 90 an jet bede, majer ka sera?
Informan	:	Ka subblok pak, molae lambek ngak nika pon
Peneliti	:	Mon bede saluran se gujur tabe rusak, sera se mateppak? Olle ka'emma pessena?
Informan	:	enggih kaule Pak, sareng tokang torap sareng petani.. Pessena minta oronan ka petani. E loar pesse torapan
Peneliti	:	Apa pernah terjadi ada petani yang melanggar kesepakatan pembagian air?
Informan	:	Sobung pak, petani tak bengal ten kan meste e temmo. Kan bede tokang torap se ngontrol.
Peneliti	:	Ada sanksi ka petani?
Informan	:	Sobung pak. Mon bede meste e pate'e aingnga bik kaule, deggik genika mon norapa majerre e palarang bik kaule. Deddi mak le jerre genika petani.
Peneliti	:	Sanapa pak larangnga?
Informan	:	majer dua kale lipat, pokokna kodu kerras.
Peneliti	:	Seberapa sering?
Informan	:	Jarang samangken, jerre pon tak Bengal ngicok petani

Peneliti	:	Ka tong settongnga petani, empiyan kenal pak?
Informan	:	enggih kenal pak, roco kan bennyak reng ka'ento pak
Peneliti	:	Apa ada hubungan saudara tabe keluarga?
Informan	:	enggih bede beberapa se ning ngingning
Peneliti	:	napa bede perbedaan perlakuan?
Informan	:	Engalak agi re karena aing pak, kan tak nyaman polana ning ngenning
Peneliti	:	Mon se ning ngingning majerre pade?
Informan	:	Enggih genika tak nyaman kaule, meste bida Pak. Biasana 30 rb gi majer 20 rb.
Peneliti	:	Ka petani empiyan semmak pak?
Informan	:	Gi mon bede peatni sakek, gik nyapot Pak. Mon komantanan kan meste e undang Pak, jereng tatangge ka'enje.
Peneliti	:	Empiyan sabben sebagai petani, pernah ngalami kakorangan aing?
Informan	:	enggih biasa pon mon musim MT 3 bennyak se kakorangan genika.
Peneliti	:	Pas beremma carana ngadebbi mon MT3?
Informan	:	enggih tadhek pak, ka'enje kan sobung kompa. Deddi aing nyittong ka proyek.

5. Wawancara dengan Bapak Rh (Petani, 10 th bertani)

Peneliti	:	Brp luas tanah bapak?
Informan	:	2 Ha
Peneliti	:	Kebutuhan air sawah, semuanya diambil dari sampean baru?
Informan	:	iya
Peneliti	:	Apa air sudah sesuai kebutuhan petani?
Informan	:	mon MT1, MT 2 mencukupi pak..klo MT 3 tidak mencukupi.
Peneliti	:	Gimana maksudnya itu Pak?
Informan	:	Posisi sawah saya itu kan dibelakang, jadi jauh dari pintu. Jadi kalo sudah MT3, saya Cuma bisa ngairi satu ereng..sisanya empat ereng itu kerreng.
Peneliti	:	Klo bapak mengalami kekurangan air, gimana solusinya?
Informan	:	Tidak ada solusi itu Pak, nunggu musim hujan. Jadi saya gak jalan itu sawahnya yang empat ereng
Peneliti	:	berkurang dong Pak pendapatannya?
Informan	:	iya pastinya Pak, kalo yang empat ereng itu saya Tanami kan tambah rugi saya Pak. Modal besar hasilnya minim.
Peneliti	:	Gak disewakan atau gmn gitu pak?
Informan	:	Gak, gak ada yang mau. Karena gak bisa ditanami, itu istilahnya Bero.
Peneliti	:	selain MT 3 pernah ngalamin kurang air?
Informan	:	Kalo MT 1 gak pernah, karena musim hujan. Kalo MT2 itu kadang-kadang Pak. Padahal saya sudah bayar itu Pak, tapi airnya gak sampek kesaya. Itu permainan subblok sama

		tokang torap Pak.
Peneliti	:	Sering seperti itu? Trs bapak gimana?
Informan	:	ya gak tiap giliran Pak, kadang-kadang aja. Ya saya protes ke subblok. Saya sudah bayar kok gak di torap.
Peneliti	:	Itu gak ditorap karena gak kebagian air apa karena dialihkan ke petani lain?
Informan	:	ya dialihkan ke orang lain Pak, kan masih MT2 masak gak kebagian air.
Peneliti	:	Petani rutin bayar iuran?
Informan	:	iya rutin Pak, kalo musim sekarang ini pak pas MT 3 ini saya bayar 50-60rb per kotak. Jadi satu ereng saya 200-250. Kalo dilain itu mon MT 2 itu 40, klo MT1 itu saya bayar panggubuk saja. Lebih murah.
Peneliti	:	Iuran yang sampeyan bayar sama air yang masuk apa seimbang?
Informan	:	mahal Pak, klo ditotal-total biaya produksi saya besar dibandingkan sama sawah yang deket dengan saluran.
Peneliti	:	Sebelum subblok yang sekarang Bapak juga bayar iuran?
Informan	:	iya bayar Pak, Tahun ini sama dengan tahun kemarin. Pernah naik itu tapi lupa saya tahunnya.
Peneliti	:	Apa ada perubahan jumlah uang tiap tahun?
Informan	:	Besarnya iuran itu tergantung subblok, klo petani ikut subblok
Peneliti	:	Subblok yang lama (sebelum yang sekarang) ?
Informan	:	Pernah si naik tapi saya lupa. Udah lama saya lupa tahunnya. Subblok yang sekarang sama yang dulu itu sama aja Pak. Kurang pelayanan terhadap petani.
Peneliti	:	Gimana maksudnya itu pak?
Informan	:	ya kalo norap itu, siapa yang bayar torapan besar, mahal itu yang ditorap Pak. Gak adil tu Pak, saya mau protes ra sara gillu takut tu Pak. Takok tak di torap nanti punya saya.
Peneliti	:	Kalo misalnya skrg bukan giliran bapak norap, tapi bapak butuh norap, apa bayarnya perlu nambah?
Informan	:	Iya harus nambah Pak bayarnya, kan bukan giliran saya. klo musim sekarang ya saya bayar 60. Kadang masih ngasih rokok gik aberrik nasi itu sama tokang torapnya.
Peneliti	:	Pernah gak sudah bayar tapi gak diairin?
Informan	:	sering Pak, kadang cuma dapat salokkek trus mati airnya.
Peneliti	:	Pernah bermasalah Pak sama petani lain waktu Bapak ambil giliran dia?
Informan	:	pernah kapan hari tu Pak, saya a tokar polana aing. Pas subbloknnya datang, ya didamaikan dijanjikan aing temor.
Peneliti	:	trs hubungan sama petani tadi gimana pak?
Informan	:	Ya jadi nyaman tak nyaman itu da..
Peneliti	:	Apa berpengaruh kemudahan mendapat air terhadap jumlah produksi?

Informan	:	iya Pak pasti itu. Saya kan susah dapat air, jadi saya harus bayar lebih. Makanya biaya saya jadi lebih besar.
Peneliti	:	Berapa produksina pak?
Informan	:	Klo MT2, saya nanam jagung bisa sampek 20 ton lebih. Kalo MT3, perak olle 3 ton jagung saja. Kan Cuma satu ereng yang ditanami. Klo MT 1, saya nanem padi hasilnya 3.5ton.
Peneliti	:	Norap itu berapa hari sekali?
Informan	:	Tergantung musim dan apa yg ditanam Pak. Mon padi ya tiap minggu norap, mon musim hujan. Kalo MT3 tiga giliran sekali saya dapat air, klo MT2 kadang satu putaran kadang dua putaran.
Peneliti	:	tergantung komoditas sama musim ya Pak?
Informan	:	iya, klo jagung kan gak butuh banyak air.
Peneliti	:	berapa biaya produksinya untuk aing pak?
Informan	:	yang MT1: kan majer gebbeh deri 10 sak majer 1 sak ka subblok. Kalo MT2 biaya air ya sekitar 5%, MT3 sekitar 10%.
Peneliti	:	Empiyan kenal ka petani lain?
Informan	:	enggih kenal pak
Peneliti	:	Ka subblok?
Informan	:	Enggih kenal kia Pak, kenal biasa gerua pon.
Peneliti	:	Ada perbedaan perlakuan gak pak, antara yg kenal sama yg tidak?
Informan	:	Klo roco pas gik sakelluargaan ya gampang dapat air Pak, klo kayak saya kan bukan saudara bukan apa ya agak sulit dapat air kalo bukan gilirannya. Kadang pas giliran aja susah dapat air.
Peneliti	:	pernah gak Pak, Bapak giliran aing tapi saudaranya juga butuh airnya dikasih ke siapa?
Informan	:	Pernah Pak, ya dikasih ke saudaranya. Pas lain hari itu saya tambahin saja, ngasih rokok lagi biar ngalir ke saya airnya.
Peneliti	:	Apa bapak tau uang iuran air itu jalannya kemana?
Informan	:	Dak tau Pak, itu kan sudah jadi urusanna subblok
Peneliti	:	Apa bapak pernah ikut rapat petanggung jawaban iuran HIPPA?
Informan	:	Nah itu lagi Pak, disini ini HIPPA nya cuma ada papan nama tapi gak jalan. Dan HIPPA itu gak punya kuasa, lebih kuasa subblok. Itu katanya, pas pembagian uang, HIPPA na itu ditaning uangnya sama subblok. Setau saya di sampeyan baru ini, banyak HIPPA yang gak jalan.
Peneliti	:	Apa petani pernah diikutsertakan dalam pembuatan AD/ART HIPPA?
Informan	:	endak Pak, tak pernah norok saya
Peneliti	:	Apa bapak pernah ikut rapat petanggung jawaban iuran HIPPA?

Informan	:	endak Pak, dak pernah ada.
Peneliti	:	Apa HIPPA rutin ngadakan rapat anggota?
Informan	:	endak, dak pernah ada.
Peneliti	:	Apa bapak sebagai petani merasakan manfaat adanya HIPPA?
Informan	:	endak bu, HIPPA na gak jalan itu Pak. Yang ngatur air itu ya dari subblok, kan lebbih kuasa subblok daripada HIPPA.
Peneliti	:	Berarti sobung manfaatta gi Pak?
Informan	:	Dak ada Pak
Peneliti	:	Harapanna Bapak thdp HIPPA?
Informan	:	HIPPA bisa berfungsi sebagaimana mestinya, sesuai AD/ART
Peneliti	:	gimana proses pemilihan subblok?
Informan	:	seperti pilihan petinggi itu, pake nyoblos juga.
Peneliti	:	siapa yang boleh maju jadi subblok?
Informan	:	siapa aja boleh, itu abende Pak, besar biayana untuk jadi subblok. Buat bayar-bayar itu da Pak, serangan fajar. Makanya subblok kan ka pesse sara itu Pak, biayana raje itu.
Peneliti	:	Yang boleh milih itu siapa?
Informan	:	Petani diwilayah subblok itu aja.
Peneliti	:	Berarti klo gitu, subblok mihak ke yg milih nanti?
Informan	:	iya kan itu tadi Pak, cakna semmak na.

6. Wawancara dengan Bapak Hy (Pengurus HIPPA, Umur 48 th)

Peneliti	:	Bapak di HIPPA sebagi apa Pak?
Informan	:	sebagai ketua, sudah 4 tahun
Peneliti	:	Nama HIPPA nya apa Pak?
Informan	:	HIPPA Karya Makmur Desa Perante
Peneliti	:	Ada AD/ART Hippa Pak? Kapan dibuat?
Informan	:	Ada, pada awal pembentukan pengurus dipake terus.
Peneliti	:	Kalo ada perubahan AD/ART gimana pak?
Informan	:	Kita musyawarah lagi, dari subblok, seagain perwakilan petani dan pihak pemerintah Desa. Kepala Desa kan Pembina HIPPA, jadi nanti hasil musyawarah dilaporkan ke BPD.
Peneliti	:	Sejauh ini apa perubahannya Pak?
Informan	:	ada, seperti biaya turap. Kan dari tahun ke tahun tidak sama.
Peneliti	:	Bagaimana proses pemilihan ketua HIPPA?
Informan	:	Yang di Desa Perante, dilakukan musyawarah dengan dihadiri perwakilan petani. Persubblok biasanya diundang 10 orang petani. Lalu per subblok mewakili nama/calon yang akan menjadi ketua.
Peneliti	:	Kalau pengurus gimana Pak?
Informan	:	Dipilih di musyawarah itu juga, lewat musyawarah tapi kan tetap hak sepenuhnya yang milih ya ketua. Ketua bisa mengajukan nama pengurus tapi forum juga harus menyetujui.
Peneliti	:	Petani bisa jadi pengurus pak?

Informan	:	Bisa, karena semua petani punya hak jadi pengurus tapi hanya yang berdomisili di Desa Perante. Kalau petani yang punya lahan di Desa Perante, tapi berdomisili diluar Desa ya tidak bisa, mereka hanya punya hak pilih tapi gak bisa dipilih jadi pengurus ataupun ketua.
Peneliti	:	Program-program HIPPA tentang apa saja pak?
Informan	:	Mengadakan pertemuan, karena dengan pertemuan ketika ada masalah kita bisa bahas disana. Juga bisa untuk kerukunan anggota HIPPA. Rutin ini dilakukan setengah bulan sekali. Pertemuannya dengan subblok tapi petani juga boleh ikut, PPL juga ikut.
Peneliti	:	Program yang lain apa pak?
Informan	:	Pelayanan ke petani. Seperti pembangunan saluran. Dari uang kas yang ada diberikan kembali ke petani.
Peneliti	:	Ada kendala pak dalam pelaksanaan program?
Informan	:	ada, apalagi kondisi sekarang debit air yang kecil jadi pelayanan subblok terhadap petani pasti kurang maksimal.
Peneliti	:	Peranan HIPPA dalam operasional dan pemeliharaan Pak?
Informan	:	Kita mempunya hanya membantu, kalau ada masalah di subblok tertentu. Selanjutnya ya kita usulkan ke Dinas, seperti pembuatan plengsengan. Kemaren sempat ada program dari dinas pemeliharaan jaringan. Tapi ternyata, kemaren gak tembus karena setelah disurvei gak masuk karena jaringan kita pakai plat cor bukan batu.
Peneliti	:	Terkait pendanaan program2 HIPPA dan OP?
Informan	:	Swadaya dari petani, seperti kemaren kita swadaya membuat jembatan cor ukuran 3 meter x 1.5 meter..pokoknya truk besar masuk. Kita juga usulkan jalan pertanian ke Dinas Pertanian. Jadi ya saya selalu nyoba nyari peluang-peluang ke pemerintah untuk ngatasi kendala yang ada.
Peneliti	:	Bagaimana peran pemerintah terhadap HIPPA?
Informan	:	Saya merasa dinas itu kurang melakukan pembinaan ke HIPPA. Kayak gak terurus. Jadinya kita juga kurang greget.
Peneliti	:	Tentang dana torapan, setau Bapak mulai kapan HIPPA mengelola dana itu?
Informan	:	Itu yang mengelola langsung subblok, berapapun besarnya dan bentuknya langsung dikelola subblok. Kita taunya HIPPA ada setoran kas dari subblok
Peneliti	:	Kalau tahun 1999 gimana Pak?
Informan	:	sudah ada Pak
Peneliti	:	Uang kas nya berapa pak yang disetor per subblok?
Informan	:	Kita tidak membatasi jumlah, pokoknya gak mau merugikan subblok atau tukang turap. Biasanya setiap pertemuan setornya dan masing-masing subblok itu beda-beda setornya, biasanya tergantung luas wilayahnya. Antara 20 rb s/d 50 rb

		per pertemuan, ada juga yang nyetor 100rb tapi jarang sekali.
Peneliti	:	Pemilihan ketua dan pengurus berapa tahun sekali?
Informan	:	di AD/ART disepakati 5 tahun sekali, tapi malah kadang gak mau yang mengganti. Karena memang gak ada gaji, kita cuma dapat bingkisan tiap lebaran, itu hasil menyisihkan dari uang kas. Tapi kan disaat ada masalah kita diserang terus.
Peneliti	:	Banyak masalah ya Pak?
Informan	:	Iya pak, apalagi di Sampeyan baru ini kan airnya kecil. Kasihan sama subblok saya. Ada pengerukan ini yang jadi masalah, harusnya kan air itu dibuka sedikit sudah ngalir. Tapi malah gak jalan airnya kalau ada pengerukan
Peneliti	:	Kendalanya banyak ya Pak?
Informan	:	Iya Pak, kalau boleh mundur saya mau mundur karena masalah banyak tapi kan ndak dapat apa-apa. Makanya banyak HIPPA yang gak jalan di Desa-desa lain karena memang gak dapat apa-apa. Beban moral juga kan Pak kalau ada petani yang tidak kebagian air.
Peneliti	:	Pemanfaatan kas untuk apa biasanya pak?
Informan	:	untuk bingkisan lebaran, kaos seragam sama pembiayaan kalau ada kebutuhan perbaikan saluran
Peneliti	:	Kalau dulu sebelum ada HIPPA siapa yang membiayai OP?
Informan	:	Dulu, iuran air itu kan dari subblok langsung ke desa. Yang ngelola ya tetap subblok.
Peneliti	:	Kalau di AD/ART apa ada pembagian pemanfaatan iuran air?
Informan	:	di AD/ART memang ada prosentase dari subblok, tukang torap dan kas HIPPA. Tapi itu kan kalau kondisi tanaman bagus. Kalau tanaman mati jadi sulit. Jadi kita tidak membebani dengan hal seperti itu.
Peneliti	:	Kesulitan gak pak untuk memperoleh dana turapan?
Informan	:	Ndak pak, kadang memang ada petani yang minta diturap sekarang tapi ndak langsung bayar. Tapi ya biasanya sudah ditangani oleh subbloknya
Peneliti	:	Petani bayar iurannya ke tukang turap apa subblok pak?
Informan	:	harus ke subblok Pak, subblok baru ngasih ke tukang turap
Peneliti	:	Apa ada sangsi kalau ada petani yang gak bayar?
Informan	:	Ya ndak di turap lagi, kalau mau diturap ya harus bayar dulu yang kemaren
Peneliti	:	Besaran dari biaya turapnya berapa pak?
Informan	:	Bayarnya per lokkek, tergantung bulan pak. Kalau bulan seperti ini susah air ya sekitar 50rb/lokkek, kalo musim hujan paling ya cuma 20-25rb.
Peneliti	:	Apa ada rapat pertanggungjawaban pengurus HIPPA?
Informan	:	Ndak ada pak, kan kita ada pertemuan tiap setengah bulan itu. Jadi ya kita sampaikan di pertemuan itu. Evaluasi program dan pengelolaan kas kita sampaikan disana.

Peneliti	:	Bagaimana pembagiannya iuran itu Pak?
Informan	:	Biasanya 10% untuk kas HIPPA, 40% untuk subblok dan 60% untuk tukang torap.
Peneliti	:	Disini ada GHIPPA?
Informan	:	ada
Peneliti	:	apa pernah setor kas ke GHIPPA?
Informan	:	belum pernah, saya hanya pernah tau ada GHIPPA tapi tidak pernah ikut dalam rapat GHIPPA. Gak tau jalan apa ndak.
Peneliti	:	Apa ada hasil rapat berupa notulen rapat?
Informan	:	ada, semua urusan administrasi kita berusaha lengkapi. Absensi, buku tamu, notulen rapat semua ada. Kita kan programnya pelayanan jadi gak hanya fokus ngurus air, tapi juga sasaran kita bagaimana usaha petani ini jalan. Kita pernah mengundang BPP untuk membahas masalah hama dan penyakit.
Peneliti	:	Apa HIPPA ada usaha lain?
Informan	:	ndak ada pak
Peneliti	:	di HIPPA parante apa sudah berbadan hukum?
Informan	:	Belum Pak, tapi AD/ART sudah jalan
Peneliti	:	Pembagian iuran itu apa hasil perubahan?
Informan	:	iya pak, kalau dulu kan banyak penggubuk jadi iuran dari persentase hasil tani.

7. Wawancara dengan Bapak Nk (Juru, Umur 31 th)		
Peneliti	:	Sudah berapa lama diangkat jadi juru?
Informan	:	sekitar 4 tahun mulai 2012
Peneliti	:	Sebelum itu?
Informan	:	staff UPTD pengairan
Peneliti	:	Gimana peranan juru dalam pembagian air?
Informan	:	salah tugas juru adalah pelayanan terhadap petani. Juru harus menetapkan kondisi air pada kebutuhan di wilayah saya. Di wilayah saya butuh air 4 kubik.
Peneliti	:	Kalau kurang?
Informan	:	Kalau kurang saya harus menggembungkan di depan. Memang pada sampeyan baru ini sistemnya giliran. Kemungkinan sebesar apapun air yang mengalir tidak mencukupi kebutuhan diwilayah itu sendiri. Jadi untuk memenuhi kebutuhan ya tetap harus ngampung ke wilayah hilir. Kebetulan di belakang wilayah kami ada 3 juru, jadi ngampung ke juru di hilirnya.
Peneliti	:	Kalau musim hujan apa cukup?
Informan	:	Sebagian ada yang masih ngampung, karena kebutuhan air sangat besar. Banyak petani yang nanam padi. Dan hujan kadang tidak terus menerus

Peneliti	:	kalau air kecil, musim kemarau akhir gimana?
Informan	:	Kalau air kecil dialirkan apa adanya, tapi kalau air masih mampu ke pintu yang hilir yg jelas tidak mencukupi tetap ngampung ke yang belakang. Itupun kalau air nyampek ke belakang. Kalau ndak ya gimana usaha juru untuk bisa menuhin itu. Jadi di Sampeyan baru ini ya tidak bisa lepas dari ngampung air dari juru yang hilir. Resikonya, juru yang paling hilir ndak punya ampungan.
Peneliti	:	Apa juru memberi informasi jumlah air pada subblok?
Informan	:	Setiap 10 hari sekali kita ada rapat dengan subblok, disitu kita menginformasikan debit air kepada subblok. Pelaksanaan rapat itu satu hari sebelum air datang. Jadi juru mengevaluasi air yang lalu, kemudian memperkirakan air yang akan datang. Informasi air dari bendung.
Peneliti	:	Informasi itu apa sekedar pemberitahuan saja atau ada dokumen tertulis?
Informan	:	kalau dari bendung kadang ada tertulisnya, tapi kadang hanya informasi lisan sama pihak bendung. Ada pencatatan debit air setelah giliran air. Untuk informasi air yang akan datang tidak. Hanya sekedar perkiraan saja.
Peneliti	:	Apa ada kendala untuk mendapat informasi jumlah air yang akan diterima juru?
Informan	:	Setiap giliran air mesti ada kendala diantaranya, pengambilan liar dari subblok hulu yang tidak bisa diatur, dari tempolo dan pengambilan melalui mesin. (maksudnya juru mau dapat informasi jumlah air apa ada kendala?)
Peneliti	:	Informasi airnya gimana?
Informan	:	ya itu tadi, kita hanya berpedoman pada nangger di kros nangger. Jadi ya kita hanya memperkirakan saja.
Peneliti	:	Jalan keluarnya untuk mengetahui jumlah air yang akan datang gmn?
Informan	:	Jadi ya kita berpedoman pada juru hulu, biasanya sama.
Peneliti	:	Apa juru membutuhkan dana untuk mengetahui air yang akan datang?
Informan	:	iya, karena semakin lama debit air semakin berkurang dan kita sistimnya giliran jadi kita membutuhkan penjagaan terutama di musim kemarau, dana itu untuk membayar penjaga pintu air.
Peneliti	:	Untuk mendapatkan irnformasi air tidak butuh dana?
Informan	:	Tidak, hanya saat air datang.
Peneliti	:	Apa HIPPA memberikan dana operasional untuk penjagaan td?
Informan	:	seperti saya katakana tadi, di kami ada rapat 10 harian. Dana tersebut tidak melalui HIPPA tapi melalui subblok bukan dari HIPPA

Peneliti	:	Apa sering terjadi debit air yg ada tidak sesuai kebutuhan?
Informan	:	Iya sering terjadi karena ada pengambilan liar tadi itu. Jadi juru harus ngampung ke juru hilirnya.
Peneliti	:	Apa ada biaya ngampung air itu?
Informan	:	ada biaya, biasanya ditanggung subblok sendiri. Tidak melalui juru juga tidak melalui HIPPA. Juru hanya melayani di air giliran kedung lo saja, di air dinas saja bukan air ampungan. Karena sudah ada juru hilir yang ngatur kalau air ampungan. biayanya diambilkan dari uang torapan petani.
Peneliti	:	Apa selalu bisa?
Informan	:	Tidak selalu, karena juru hilir juga mempertimbangkan debit air juga. Kalau cukup di wilayahnya ya dikasih sebagian kalau gak ya gak dikasih.
Peneliti	:	kalau kondisinya seperti it gimana? debit air kurang tapi air ampungan juga gak ada..
Informan	:	Tiap sistim di juru itu beda, kalau sistim di juru hilir itu pendanaan penjagaan itu diambilkan dari pintu yang hulu, dari ampungan2 itu. pembayaran dana untuk penjaga pintu biasanya di ambilkan dari pintu ampungan. Kalau subblok yang tidak dapat air itu, dapat uangnya dari uang ampungan itu.
Peneliti	:	Langkah apa yg dilakukan juru untuk mengatasi kekurangan air?
Informan	:	ya itu solusinya, ngampung sama juru yang bawah. Walaupun usaha juru itu dikembungkan ta apa selalu gak mencukupi jadi ya harus ngampung sama juru hilir.
Peneliti	:	apa tidak ada jadwal tanam?
Informan	:	ada itu RTTG, rencana tanam global, itu yang ngatur subblok.
Peneliti	:	Apa juru mengenal semua petani di wilayahnya?
Informan	:	tidak semua, sebagian saja. Juru hanya kenal ke subblok karena juru lebih sering berhubungan dengan subblok bukan dengan petani langsung
Peneliti	:	apa juru sering terlibat dalam kegiatan sosial dg petani?
Informan	:	ita pernah, kadang saya diundang pernikahan, selamatan, melayat kalau ada yang mati.
Peneliti	:	ttg UU no.3 tahun 1999 gmn?
Informan	:	saya kira gak berubah, dari dulu uang torapan itu ya diatur sama subblok, subblok yang tau gimana pembagiannya. Untuk kas desa berapa, untuk hippa berapa.
Peneliti	:	apa subblok memberi uang ke Hippa untuk kas?
Informan	:	iya ada, subblok ngasih ke hippa.
Peneliti	:	siapa yang menentukan besarnya iuran air?
Informan	:	yang nentukan itu subblok, bukan di Hippa.
Peneliti	:	kok sepertinya hippa dilangkahi sama subblok? kan seharusnya subblok itu dibawah hippa

Informan	:	ya karena hipa gak jalan, jd petani ya lebih hormat ke subblok. Pernah hipa yg ngurusin tapi petani gak puas, jadi pengaturan air dikembalikan ke subblok.
----------	---	--



LAMPIRAN II. PEDOMAN PERTANYAAN

Pada teknik wawancara mendalam (*indepth* interview), peneliti akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait tema dan fokus penelitian yang diungkapkan secara terbuka dan mengalir. Pertanyaan bisa berbeda-beda untuk setiap informan. Namun, peneliti tetap memiliki pedoman dalam bertanya. Beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada informan terkait tema penelitian adalah sebagai berikut :

Informan : Perwakilan pengurus HIPPA

1. Apa peran Bapak dalam kepengurusan HIPPA?
2. Apakah HIPPA membuat AD/ART setiap tahunnya? (AD/ART sebagai dokumen)
3. Bagaimana proses pemilihan ketua dan pengurus HIPPA?
4. Apa bisa petani anggota menjadi ketua atau pengurus HIPPA?
5. Apa program-program HIPPA tahun ini atau tahun sebelumnya?
6. Apa program-program tersebut sudah dilaksanakan? Apa terdapat kendala dalam pelaksanaannya?
7. Apa kendala yang dialami HIPPA dalam pelaksanaan peran O&P?
8. Bagaimana HIPPA mengatasi kendala tersebut?
9. Darimana sumber pendanaan program-program HIPPA ataupun pelaksanaan O&P?
10. Apakah terdapat kesulitan dalam memperoleh dana tersebut?
11. Apakah terdapat sanksi bagi petani yang ingkar dalam pembayaran iuran?
12. Berapa besarnya iuran tersebut?
13. Apakah terdapat perbedaan besarnya iuran antara musim hujan dan musim kemarau?
14. Bagaimana bentuk tanggung jawab dari pelaksanaan dana tersebut?
15. Apakah HIPPA rutin mengadakan rapat anggota? Berapa bulan sekali?

16. Apa yang dibahas pada pertemuan tersebut? (notulen rapat sebagai dokumen)
17. Apakah HIPPA memiliki usaha mandiri selain pelayanan pengalokasian air?

Informan : Juru Pengairan

1. Bagaimana peran dari juru pengairan dalam pembagian air?
2. Apakah juru memberikan informasi terkait jumlah air kepada subblok? (jadwal sebagai dokumen)
3. Apakah terdapat kendala untuk mengetahui jumlah air yang akan diterima juru?
4. Bagaimana juru mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut?
5. Apakah juru membutuhkan dana untuk mengetahui jumlah air tersebut?
6. Apakah HIPPA berkontribusi dalam membantu kebutuhan dana tsb?
7. Apa kontribusi HIPPA terhadap pengawasan air yang masuk?
8. Apakah pernah terjadi air yang masuk tidak sesuai dengan jumlah yang sudah dihitung?
9. Langkah apa yang dilakukan juru apabila air masuk tidak sesuai dengan jadwal?
10. Apakah juru mengenal secara pribadi semua petani yang ada diwilayahnya?
11. Apakah juru pernah terlibat dalam acara-acara sosial petani di wilayahnya? (missal menjenguk ketika sakit, menghadiri pesta pernikahan, melayat ketika ada orang meninggal, dll)

Informan : Subblok

1. Bagaimana peran subblok dalam pembagian air?
2. Apakah subblok mendapat informasi jumlah air dari juru?
3. Apakah jumlah air yang diberikan juru selalu tepat/sesuai dengan keadaan sebenarnya?

4. Apakah subblok memiliki jadwal tanam dari masing-masing petani di wilayahnya? (jadwal sebagai dokumen)
5. Apakah terdapat kendala dalam pembagian air?
6. Bagaimana subblok mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut?
7. Apakah subblok mendapat kesulitan dalam pengumpulan dana IPAIR?
8. Bagaimana subblok mengatasi kesulitan tersebut?
9. Berapa jumlah iuran yang harus dibayarkan petani?
10. Apakah ada sanksi bagi petani yang tidak mau membayar dana IPAIR?
11. Pernahkah petani melakukan pelanggaran terhadap jadwal air yang sudah ditetapkan?
12. Apakah ada sanksi apabila terjadi kecurangan seperti itu?
13. Apakah subblok mengenal secara pribadi semua petani yang ada di wilayahnya?
14. Apakah kedekatan antara subblok dan petani dapat mempermudah petani mendapatkan air?
15. Apakah subblok pernah terlibat dalam acara-acara sosial petani di wilayahnya? (missal menjenguk ketika sakit, menghadiri pesta pernikahan, melayat ketika ada orang meninggal, dll)

Informan : Perwakilan petani

1. Apakah selama ini pembagian air sesuai dengan kebutuhan petani?
2. Apa kendala dalam memenuhi kebutuhan air tersebut?
3. Bagaimana upaya petani untuk memenuhi kebutuhan air yang tidak bisa dipenuhi oleh pengaturan air HIPPA?
4. Apakah petani rutin membayar IPAIR? Berapa jumlahnya?
5. Apakah petani merasakan manfaat dari pembayaran IPAIR?
6. Apakah terdapat perbedaan besarnya iuran pada musim kemarau dan musim penghujan?
7. Apakah petani harus membayar lebih (diluar iuran rutin) agar bisa mendapatkan air?

8. Apakah petani pernah berkonflik dengan petani lain terkait dengan pemenuhan kebutuhan air?
9. Bagaimana cara mengatasi konflik tersebut?
10. Apakah kemudahan dalam memperoleh air mempengaruhi produksi dan pendapatan petani?
11. Berapa jumlah produksi (ton) yang diperoleh petani apabila terjadi kesulitan mendapat air?
12. Berapa jumlah produksi (ton) yang diperoleh petani apabila terjadi kemudahan mendapat air?
13. Berapa jumlah Iuran HIPPA yang harus dikeluarkan setiap musim tanam?
14. Berapa persen total biaya produksi untuk setiap musim tanam (padi/jagung/tebu) ?
15. Apakah terdapat perbedaan pendapatan petani pada musim hujan dan musim kemarau?
16. Apakah petani mengenal secara pribadi petani lain disekitar area sawahnya?
17. Apakah kedekatan dengan juru/subblok membuat petani mudah memperoleh air?
18. Apakah petani dilibatkan dalam penyusunan AD/ART HIPPA?
19. Apakah petani pernah diundang dalam rapat pertanggungjawaban pemakaian dana IPAIR?
20. Apakah HIPPA rutin melakukan rapat anggota dan mengundang petani?
21. Apakah petani merasakan manfaat keberadaan HIPPA di daerahnya?
22. Apa harapan petani kepada HIPPA?